

No. 198 Agustus 2022

BaKTI**News**

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MENCEGAH PERKAWINAN ANAK MELALUI
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP**

**CO-DESIGN UNTUK MENGURANGI
PUTUS SEKOLAH DI MAMUJU**

**BERSINERGI MENUJU
MASYARAKAT INKLUSIF**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI**News**

Agustus 2022

No. **198**

- 1** Mencegah Perkawinan Anak melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
Oleh **YUSRI**
- 6** Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Rakyat (Bagian 2-Selesai)
Oleh **TIM PENELITI SMERU**
- 11** Pemuda Mendobrak Tabu
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 15** Bersinergi Menuju Masyarakat Inklusif
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 19** Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan, Bagaimana Laki-Laki Berperan Mewujudkan Kesetaraan Gender?
Oleh **HAFIDIN**
- 23** *Co-Design* untuk Mengurangi Putus Sekolah di Mamuju
Oleh **VICTOR MATANGGARAN**
- 27** Menikmati Pesona Bentang Alam Berbalut Budaya Rammang-Rammang (Bagian 1)
Oleh **SLAMET RIADI**
- 31** Data Bicara: Program KB Turunkan Angka Kematian Ibu Dalam 50 Tahun Terakhir di Indonesia
Oleh **AHMAD NURHASIM**
- 33** Bingung dengan Istilah Perubahan Iklim? Berikut 7 Istilah Umum dan Artinya
Oleh **WÄNDI BRUINE De BRUIN, PhD**
- 37** Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno
Oleh **EBED DE ROSARY**
- 40** Diskusi IG *Live* @infobakti dan *Podcast* Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Ilustrasi cover: **Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI**



MENCEGAH PERKAWINAN ANAK MELALUI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

Oleh **YUSRI**

Osu perkawinan anak telah menjadi isu prioritas yang tentunya berdampak pada masa depan anak baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan beberapa aspek lainnya. Dampak perkawinan anak bersifat lintas generasi, dalam artian dampak yang ditimbulkan tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan nantinya. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia.

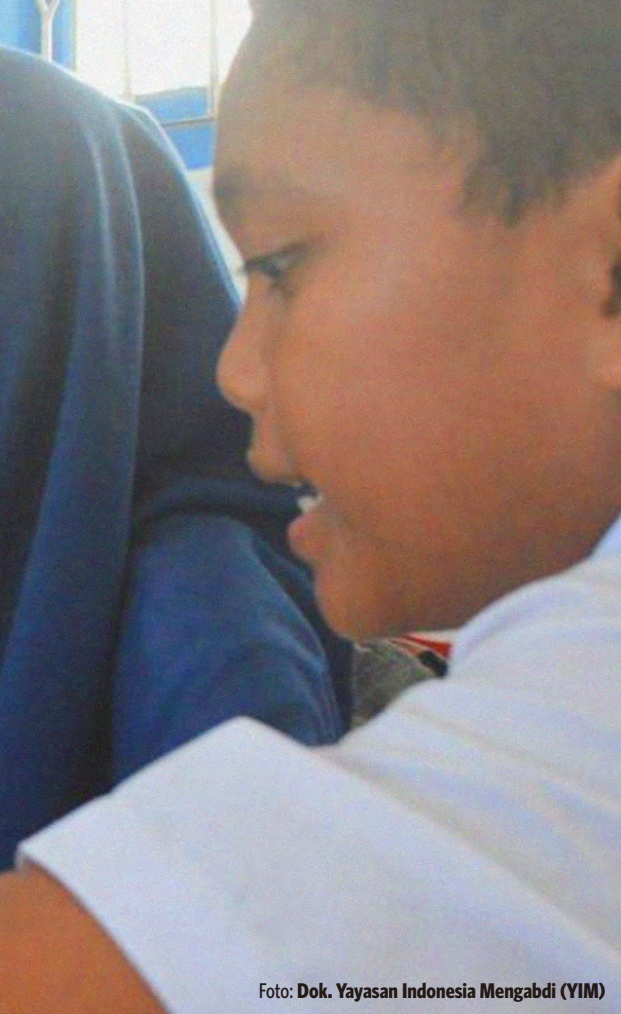


Foto: Dok. Yayasan Indonesia Mengabdi (YIM)

Masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya angka perkawinan anak. Faktor ekonomi keluarga, menuntut orang tua menikahkan anaknya dengan harapan dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Selain itu, pembelajaran *online* yang tidak optimal khususnya di daerah pedesaan, menyebabkan anak tidak memiliki aktivitas apapun, sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa terdapat 34.000 permohonan pengajuan dispensasi perkawinan dari Januari-Juni 2020, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebelum pandemi. Permohonan dispensasi kawin dilakukan karena salah satu atau kedua anak belum masuk usia menikah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus Perkawinan Anak dan Target SDGs

Kasus perkawinan anak sangat erat kaitannya dengan pencapaian beberapa aspek dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi.

1 Kasus perkawinan anak cenderung membuat anak dan keluarga terperangkap dalam lingkaran kemiskinan (Paul, 2019).

Kasus ini tentunya berkaitan dengan target SDGs 1 yakni tidak adanya kemiskinan (*no poverty*), dan juga berkaitan dengan target SDGs 2 yakni tidak adanya kelaparan (*no hunger*). Variabel kemiskinan tentunya menjadi potensi terjadinya kelaparan pada masyarakat, sehingga kedua aspek ini sulit untuk dipisahkan.

2 Dampak dari kasus perkawinan anak erat kaitannya dengan tingkat kematian ibu yang tinggi di dunia. Adedokun dkk (2016) menjelaskan bahwa ibu yang masih berusia anak ketika melahirkan berpotensi mengalami berbagai dampak pada kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan. Salah satu dampak terburuknya adalah kematian ibu. Hal ini berkaitan dengan Tujuan 3 SDGs yakni Kesehatan yang baik (*good health*). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa, anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih berusia anak, akan berpotensi mengalami *stunting* di mana anak mengalami kondisi gagal tumbuh akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek, tidak seperti pada anak normal lainnya (Efevbera, 2017). Selain itu tentunya masih banyak dampak-dampak negatif lainnya jika dikaitkan dengan kesehatan ibu dan anak.

3 Anak perempuan yang telah menikah jauh lebih berpotensi menghadapi masalah dalam pendidikannya dibandingkan dengan anak laki-laki. Mereka terpaksa putus sekolah karena peraturan sekolah tidak membolehkan hal tersebut. Selain itu, jika dikaitkan dengan aspek kesehatan, perkawinan anak tentunya jauh lebih besar merugikan



Foto: Dok. Yayasan Indonesia Mengabdi (YIM)

Tidak sedikit kasus perkawinan anak disebabkan karena kemauan orang tua ataupun keluarga dekat dari anak tersebut. Kasus ini biasanya dilandasi berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi atau ingin meningkatkan perekonomian keluarga maupun kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya.

kesehatan perempuan dan anak. Masalah ini sesuai dengan target SDGs 5 yakni kesetaraan gender (*gender equality*)

4 Perkawinan anak mengunci potensi besar anak untuk mendapatkan impian dan cita-citanya khususnya anak perempuan.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa meningkatnya angka perkawinan anak akan berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah pada anak (Wodon dkk., 2016). Hal ini berhubungan dengan target SDGs 4 yakni kualitas pendidikan (*quality of education*).

Berbagai dampak yang ditimbulkan dari kasus perkawinan anak tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu masalah serius yang perlu untuk ditangani dengan baik dan komprehensif adalah masalah perkawinan anak. Tidak terselesaikannya isu ini tentunya akan menyebabkan sulitnya mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan.

Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) atau Pendidikan Keterampilan Hidup berfokus pada mengembangkan potensi anak dalam hal ini siswa sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Siswa diajarkan bagaimana mereka dapat menggunakan keterampilan hidup dan pengetahuan tertentu untuk mengendalikan sebuah situasi atau memecahkan masalah umum yang mereka hadapi. Selain itu, anak atau remaja dalam hal ini diajarkan untuk mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri yang berpotensi memengaruhi masa depannya tentunya.

Modul PKH yang telah dikembangkan oleh UNICEF dan mitra terdiri atas 22 pertemuan yang terbagi atas 5 sub-modul meliputi modul

mengenal diri sendiri, modul membentuk kebiasaan sehat, modul mengembangkan hubungan yang saling menghormati, modul menciptakan dunia yang lebih baik, dan modul melakukan aksi bersama.

Modul pertama fokus pada mengenal diri sendiri. Siswa akan mengenali identitas pribadi mereka dengan melihat kekuatan, kelemahan dan nilai-nilai mereka. Selain itu, siswa belajar mengenai bagaimana mengekspresikan perasaannya dan gagasannya dengan cara yang tepat. Siswa juga akan diajarkan mengenai konsep citra tubuh positif di media sosial.

Pada modul 2, siswa akan belajar bagaimana mereka dapat membentuk kebiasaan hidup sehat. Siswa akan belajar menjaga kesehatan diri dalam manajemen kebersihan menstruasi (MKM) yang baik. Maka dari itu terdapat beberapa materi di modul ini meliputi, kebersihan diri, olahraga dan gizi, merokok, alkohol, dan obat-obatan, serta materi internet dan media sosial.

Pada modul 3, siswa akan mempelajari bagaimana berkomunikasi dan membentuk hubungan dengan orang lain. Siswa juga akan belajar mengenai bagaimana membentuk hubungan yang aman dan saling menghormati dengan menetapkan batasan-batasan diri mereka dan menegosiasikan persetujuan. Fokus utama di modul ini yakni guru akan membantu siswa untuk mengenali sekaligus menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya sebuah masalah seperti kehamilan di usia remaja, perkawinan anak, dan perilaku kekerasan dalam hubungan romantis mereka.

Modul 4 akan mengajarkan siswa belajar tentang dunia sekitar mereka dalam wujud konsep hak asasi manusia khususnya mengenai salah satu bentuk ketidaksetaraan seperti ketidaksetaraan gender. Siswa juga akan belajar bagaimana mempromosikan perdamaian dan kebersamaan dalam komunitas mereka. Sedangkan di modul terakhir, siswa akan mendesain kegiatan berupa aksi untuk mempromosikan nilai-nilai keterampilan hidup yang telah dipelajari di modul-modul sebelumnya. Maka dari itu, akan lebih banyak siswa nantinya yang akan memahami mengenai Pendidikan Keterampilan Hidup.

Hubungan antara Pendidikan Kecakapan Hidup dan Isu Perkawinan Anak

INEE (2019) menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan hidup untuk remaja, khususnya remaja putri sangat penting dalam membentuk dan mendukung jaringan sosial dan kehidupan keluarga mereka. Hal tersebut akan berdampak pada penguatan keterampilan untuk bernegosiasi dengan lingkungan mereka, pemahaman mengenai hak seksual dan reproduksi, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pendidikan. Survei lain yang dilakukan oleh UNFPA (2017) menyatakan bahwa penguatan jaringan sosial dan membangun hubungan dengan keluarga dan lingkungan berhasil melindungi anak perempuan dari kekerasan fisik dan perkawinan anak (UNFPA, 2017).

Terdapat beberapa hubungan antara potensi penyebab perkawinan anak dan materi pendidikan kecakapan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan memahami materi pendidikan kecakapan hidup, maka beberapa potensi penyebab perkawinan anak dapat diminimalisir ataupun dapat dicegah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, diantaranya seperti paksaan atau kemauan orang tua atau keluarga, kehamilan yang tidak diinginkan, budaya lokal, dan beberapa faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut sangat berkaitan dengan materi-materi yang diajarkan dalam Pendidikan Kecakapan Hidup.

Tidak sedikit kasus perkawinan anak disebabkan karena kemauan orang tua ataupun keluarga dekat dari anak tersebut. Kasus ini biasanya dilandasi berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi atau ingin meningkatkan perekonomian keluarga maupun kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya. Beberapa orang tua menganggap ketika anaknya tidak dinikahkan, maka anak tersebut akan berpotensi hamil di luar pernikahan. Namun sayangnya, ketika kasus ini terjadi, tidak sedikit anak bisa bersifat asertif atau menolak kemauan orang tuanya tersebut. Beberapa anak cenderung



Foto: Dok. Yayasan Indonesia Mengabdi (YIM)

mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tuanya, meskipun tidak sesuai dengan keinginannya sendiri.

Salah satu materi dalam Pendidikan Kecakapan Hidup adalah tentang konvensi hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, dimana pada materi tersebut anak akan diajarkan berbagai hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh anak. Konvensi ini menekankan agar hak asasi manusia bagi semua orang berusia di bawah 18 tahun, dihargai dan dilindungi. Salah satu pasal dalam konvensi tersebut yakni pasal 12 menjelaskan bahwa anak berhak untuk mengekspresikan pandangannya mengenai permasalahan apapun yang memengaruhinya, dan pandangan anak tersebut harus diperhatikan/ diberi bobot yang layak.

Melalui materi tersebut, anak akan menyadari bahwa mereka mempunyai hak untuk menolak ketika dipaksa atau diberikan pilihan menikah oleh orang tua atau keluarganya. Selain itu, di materi PKH, siswa akan diajarkan bagaimana menjadi seseorang yang asertif, yakni berani berkata tidak, atau berani menolak ketika itu tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Salah satu penyebab lainnya terjadinya perkawinan anak adalah karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa KTD disebabkan karena adanya pergaulan bebas karena didasari oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kontrol diri; rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas; gaya hidup yang kurang baik; dan beberapa faktor lainnya. Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial mempunyai peran dalam membentuk gaya hidup remaja dan mempunyai pengaruh terhadap kontrol diri remaja. Salah satu topik yang ditekankan dalam pendidikan kecakapan hidup adalah aman bermedia sosial dan pencitraan tubuh positif di media sosial. Melalui program PKH, anak atau remaja dapat memiliki gaya hidup yang baik baik itu di dunia nyata maupun di media sosial. Selain itu, materi lain yang berkaitan di PKH yakni materi identitas saya, di mana pada materi tersebut sangat identik dengan kontrol diri remaja atau anak.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Program Analyst Yayasan Indonesia Mengabdi (YIM) dan dapat dihubungi melalui email yusri@umm.ac.id

PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEMBAKAU RAKYAT

Bagian II - Selesai

Oleh **TIM PENELITI SMERU**

Konvensi ILO No. 138 (1973) dan No. 182 (1999) menetapkan standar hukum internasional untuk usia minimum pekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Di sektor tembakau, ECLT (*Eliminating Child Labour in Tobacco growing*) Foundation didirikan untuk memulai program-program penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau. Perusahaan-perusahaan tembakau multinasional juga menerapkan program *Sustainable Tobacco Production/STP* (produksi tembakau berkelanjutan) yang, antara lain, menerapkan panduan untuk memastikan bahwa perkebunan tembakau bebas dari pekerja anak. Indonesia telah menetapkan peraturan nasional dan sebuah program untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang diharapkan tercapai pada 2022 melalui peningkatan kapasitas dan pengawasan yang lebih ketat di tempat-tempat kerja. Namun, tidak

banyak informasi yang diketahui mengenai situasi anak di komunitas-komunitas petani tembakau. Hal ini menyulitkan upaya untuk menciptakan program intervensi yang tepat sasaran.

Dalam upaya untuk memahami situasi pekerja anak di perkebunan tembakau, akar penyebab adanya pekerja anak di perkebunan tembakau, dan kemungkinan solusi untuk mengatasi masalah ini, ECLT Foundation meminta *The SMERU Research Institute* untuk melakukan studi diagnostik mengenai pekerja anak di wilayah perdesaan dengan penekanan pada perkebunan tembakau rakyat. Studi ini menggunakan dua definisi pekerja anak, yaitu definisi dari ILO dan definisi dari Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui metode survei, sementara pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), diskusi kelompok, dan



foto bercerita. Studi ini dilakukan di lima desa di Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB) dan lima desa di Jember (Provinsi Jawa Timur). Daerah-daerah ini dipilih karena termasuk penghasil utama tembakau di Indonesia. Pemilihan kabupaten dan desa sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan 100 rumah tangga yang dipilih secara acak dari masing-masing desa. Tahap peninjauan dilakukan pada Agustus 2016, survei pada Oktober 2016, dan penelitian lapangan pada sekitar Desember 2016 hingga Januari 2017.

Akar Penyebab Munculnya Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau

Faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya fenomena pekerja anak di lokasi studi, khususnya di perkebunan tembakau, dapat dibedakan ke dalam tiga kategori:

1. Lingkungan yang mendukung yang memengaruhi faktor pendorong dan penarik;
2. Faktor pendorong yang terjadi di dalam rumah tangga dan individu anak serta mendorong anak untuk melakukan aktivitas ekonomi dan menjadi pekerja anak; dan

3. Faktor penarik yang merupakan faktor yang menarik anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan secara fundamental mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja.

Ada dua faktor saling terkait yang mendasari tingginya prevalensi pekerja anak. Pertama adalah bahwa dalam norma dan kebiasaan lokal, anak yang bekerja dianggap baik. Pelibatan anak dalam usaha perkebunan tembakau telah terintegrasi dalam praktik lokal mengenai pengasuhan anak, dan umumnya merupakan norma lokal yang diterima bahwa begitu seorang individu dianggap dewasa, ia diharapkan bisa mempunyai penghasilan sendiri. Faktor kedua adalah kerangka hukum yang ada saat ini terkait pekerja anak yang belum memberikan definisi jelas mengenai kerja ringan dan kerja berbahaya yang sesuai untuk aktivitas-aktivitas kerja pertanian, khususnya pada perkebunan tembakau yang memiliki faktor bahaya spesifik.

Faktor pendorong meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran seputar isu pekerja anak, kurangnya fasilitas alternatif untuk aktivitas anak, dan motif ekonomi yang mencakup kemiskinan rumah tangga dan kepentingan ekonomi anak. Di sisi lain, faktor penarik meliputi kelebihan permintaan akan tenaga



Sumber: Smeru.id

kerja di desa, terutama selama musim panen tembakau; kurangnya teknologi dan inovasi yang dapat mengurangi dan menggantikan kerja-kerja yang padat tenaga kerja, khususnya yang sebagian besar dilakukan oleh pekerja anak; dan motif ekonomi usaha, terutama kebutuhan untuk mempertahankan harga jual dengan cara menyegerakan pengolahan daun tembakau.

Sumber Daya dan Kemungkinan Solusi

Rangkaian wawancara dan diskusi sepanjang studi ini telah mengidentifikasi sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya yang lebih berkelanjutan untuk menghapuskan pekerja anak di wilayah pertanian perdesaan, khususnya di perkebunan tembakau. Pada tingkat komunitas dan desa, ada sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penghapusan pekerja anak. Sumber daya ini meliputi:

- Forum-forum komunitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan kesadaran;
- Fasilitas publik untuk anak yang dapat ditingkatkan guna menyediakan aktivitas-aktivitas alternatif bagi anak;
- Peraturan di tingkat desa yang dapat memper-

kuat penegakan hukum serta membantu menghubungkan peraturan formal dan norma lokal; dan

- Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan dukungan keuangan bagi berbagai kegiatan kemasyarakatan terkait penghapusan pekerja anak.

Program penghapusan pekerja anak (seperti pemantauan dan pengawasan rutin terhadap pekerja anak, partisipasi dalam Program PPA-PKH, dan kerja awal untuk mengembangkan kabupaten/kota ramah anak) yang telah dimiliki pemerintah kabupaten/kota di Lombok Timur dan Jember dapat dikembangkan lebih jauh guna mendukung penghapusan pekerja anak. Peraturan yang ada mengenai pertanian tembakau dan komisi urusan tembakau juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan peningkatan kesadaran dan memperkuat kerangka pengaturan mengenai pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota di Lombok Timur dan Jember juga menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif mengenai penghapusan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau.

Rangkaian kerangka hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat disempurnakan untuk mengatur pelarangan pekerja anak secara lebih baik, khususnya dalam usaha perkebunan tembakau. Peta jalan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak—yang menargetkan untuk mencapai Indonesia yang bebas dari pekerja anak pada 2022—juga dapat lebih dilengkapi agar bisa mengatasi permasalahan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau secara lebih efektif. Selain itu, berbagai inisiatif yang didukung oleh perusahaan tembakau dan organisasi non-pemerintah (ornop) dapat ditingkatkan hingga mencakup wilayah yang lebih luas dan lebih banyak anak.

Rekomendasi

Mengingat kompleksitas faktor-faktor yang ada di balik tingginya prevalensi pekerja anak di perkebunan tembakau, kami merekomendasikan (i) perbaikan kebijakan nasional, dan (ii) program

percontohan yang dapat diprakarsai di Lombok Timur dan Jember.

Dalam memperbaiki kebijakan nasional, hal yang pertama dan paling penting adalah perlunya pemerintah mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk memperkuat faktor pendukung. Hal ini bisa dicapai dengan membuat pedoman operasional untuk pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau dengan cara merevisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 (2003). Bersama dengan itu, Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 hendaknya dilengkapi dengan strategi spesifik sektor yang berfokus pada berbagai sektor pertanian di mana prevalensi pekerja anak tinggi, termasuk di sektor perkebunan tembakau. Strategi tersebut hendaknya juga menetapkan langkah-langkah konkret, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga, dan kerangka waktu untuk aksi. Selain itu, larangan mempekerjakan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau hendaknya juga disertakan dalam peraturan tentang tembakau, baik pada tingkat nasional maupun regional (provinsi dan kabupaten/kota). Tambahan lagi, penguatan peraturan-peraturan yang ada hendaknya disertai dengan penegakan hukum yang lebih kuat dan juga advokasi yang lebih intensif untuk memengaruhi norma-norma informal, yaitu kebiasaan dan norma lokal di dalam masyarakat.

Guna memaksimalkan upaya nasional untuk menghapuskan pekerja anak, intervensi hendaknya juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai tipe pekerjaan berbahaya, konsekuensi dari pekerjaan berbahaya tersebut, dan adanya peraturan yang melarang pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau. Program-program perlindungan sosial yang ada hendaknya juga disempurnakan atau diubah untuk mengatasi isu pekerja anak secara lebih baik. Selain itu, program kabupaten/kota ramah anak hendaknya juga menyertakan langkah-langkah untuk menangani pekerja anak sesuai permasalahan lokal dan mencurahkan segala sumber daya pendanaan yang mungkin, termasuk DBH CHT, Dana Desa, dan dukungan

dari komunitas bisnis. Terakhir, dalam mengatasi faktor-faktor penarik yang digerakkan oleh kekurangan tenaga kerja, hendaknya ada upaya lebih intensif untuk mengembangkan inovasi dan teknologi baru dalam penanganan dan pengolahan tembakau agar bisa menggantikan pekerja anak dan pekerja dewasa, terutama pada tahap-tahap berbahaya dalam proses produksi tembakau.

Untuk program percontohan di Lombok Timur, langkah-langkah dapat mencakup:

- Menetapkan peraturan-peraturan formal dan informal di tingkat desa (misalnya, *awig-awig*) guna menyediakan kerangka hukum bagi tindakan yang diambil untuk menangani isu pekerja anak di desa bersangkutan.
- Pelatihan untuk tenaga kesehatan mengenai potensi risiko dan potensi bahaya, serta risiko kesehatan dan keselamatan, jika bekerja dalam usaha perkebunan tembakau.
- Mengintensifkan sosialisasi dan advokasi tentang pelarangan pekerja anak dengan melibatkan ornop setempat dan memanfaatkan guru sekolah serta lembaga pendidikan nonformal (pengajian).
- Melanjutkan sosialisasi oleh perusahaan tembakau tentang pelarangan pekerja anak bagi petani yang dikontrak perusahaan, sebagaimana telah dimandatkan kepada mereka.
- Membentuk komite pemantauan berbasis komunitas yang dipimpin oleh kader desa, guru sekolah, dan tenaga kesehatan yang ditunjuk untuk memantau keterlibatan anak dalam usaha perkebunan tembakau, terutama dalam aktivitas-aktivitas yang telah disepakati sebagai kerja berbahaya.
- Mengatasi kurangnya wahana bagi anak-anak yang menyebabkan mereka tergiring untuk memilih bekerja di perkebunan tembakau—akan perlu kiranya membangun perpustakaan umum dan fasilitas olahraga guna menyediakan wahana yang produktif, tetapi aman, bagi anak-anak untuk mengisi waktu luangnya.
- Membangun kemitraan antara Dinas Perkebunan dan sekolah pertanian setempat guna mengembangkan teknologi yang dapat mengurangi kebutuhan untuk melibatkan anak

dalam kegiatan usaha tembakau, terutama dalam aktivitas-aktivitas yang berbahaya.

- Memprakarsai program berbasis insentif untuk mengatasi motif ekonomi pekerja anak di perkebunan tembakau.

Untuk program percontohan di Jember, langkah-langkah dapat mencakup:

- Merumuskan peraturan di tingkat desa yang memuat semua penjelasan tentang hak-hak anak, pelarangan pekerja anak, pelarangan perkawinan pada usia anak, dan peraturan-peraturan lain yang dianggap penting bagi kebutuhan anak. Pelarangan pekerja anak dalam usaha perkebunan tembakau hendaknya menyebutkan secara eksplisit tahap-tahap pekerjaan berbahaya guna mencegah terjadinya kebingungan di antara warga desa. Selain itu, peraturan tersebut hendaknya juga menyertakan keharusan menggunakan APD, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak yang terlibat dalam kerja-kerja di perkebunan tembakau.
- Merumuskan peraturan di tingkat desa yang mengatur persyaratan bagi petani dan perusahaan tembakau untuk membangun gudang tembakau di luar wilayah permukiman guna mencegah anak terlibat dalam kegiatan pascapanen tembakau. Jika tidak mampu memenuhi hal ini, petani dan perusahaan tembakau hendaknya menyediakan tempat penitipan anak ataupun tempat bermain anak yang terletak di dekat gudang tembakau untuk mencegah anak membantu ibu mereka mengikat daun-daun tembakau dan memungkinkan anak bermain di lingkungan yang lebih aman.
- Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tembakau mengikuti salah satu praktik terbaik yang diintroduksi oleh beberapa perusahaan tembakau yang menerapkan *STP Guidance* (pedoman produksi tembakau berkelanjutan), yakni melakukan survei register petani.
- Membangun kemitraan dengan ornop setempat yang akan melakukan penilaian untuk memilih lokasi desa untuk percontohan. Hal ini hendaknya sudah dilakukan sebelum pelaksanaan program percontohan di Jember.

Pemilihan desa percontohan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti pemahaman perangkat desa mengenai isu pekerja anak, keberadaan program seperti Rumah Pintar atau ASP di sekolah-sekolah yang berlokasi di desa bersangkutan, dan ketersediaan sumber daya.

- Mengundang perusahaan tembakau untuk berbagi pengalaman mereka dalam melaksanakan ASP atau Rumah Pintar agar bisa mereplikasi keberhasilan program-program tersebut. Untuk mendukung aktivitas-aktivitas pada ASP dan Rumah Pintar, sumber daya yang tersedia hendaknya dimobilisasi secara efektif.
- Mendirikan Rumah Pintar di dusun-dusun juga bisa menjadi pilihan. Rumah Pintar dapat dibangun di berbagai tempat pada tingkat komunitas, yakni di tempat-tempat yang bisa dengan mudah diakses anak, misalnya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di karang taruna atau pusat kegiatan komunitas.
- Mengatasi rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pekerja anak di kalangan anak dan orang tua dengan melakukan pemetaan tokoh-tokoh berpengaruh di desa yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi hak-hak anak bagi warga masyarakat. Inisiatif ini hendaknya juga melibatkan lembaga pendidikan formal dan nonformal, PKK, majelis taklim, karang taruna, petani dan buruh tani, dan—yang paling penting—tenaga kesehatan serta pemuka desa. Mendorong perusahaan tembakau untuk mengembangkan teknologi baru serta inovasi dalam penanganan dan pengolahan tembakau.

(Selesai)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari Draf Laporan Penelitian SMERU berjudul **Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan** (dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan Tembakau Rakyat) Dengan tautan: <https://smeru.or.id/id/publication-id/studi-diagnostik-pekerja-anak-di-wilayah-perdesaan-dengan-penekanan-khusus-pada>

Penulis: **Emmy Hermanus, Stella Aleida Hutagalung, Rezanti Putri Pramana, Fatin Nuha Astini, Elza Elmira, Veto Tyas Indrio Widjajanti Isdijoso.**

PEMUDA MENDOBRAK TABU

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

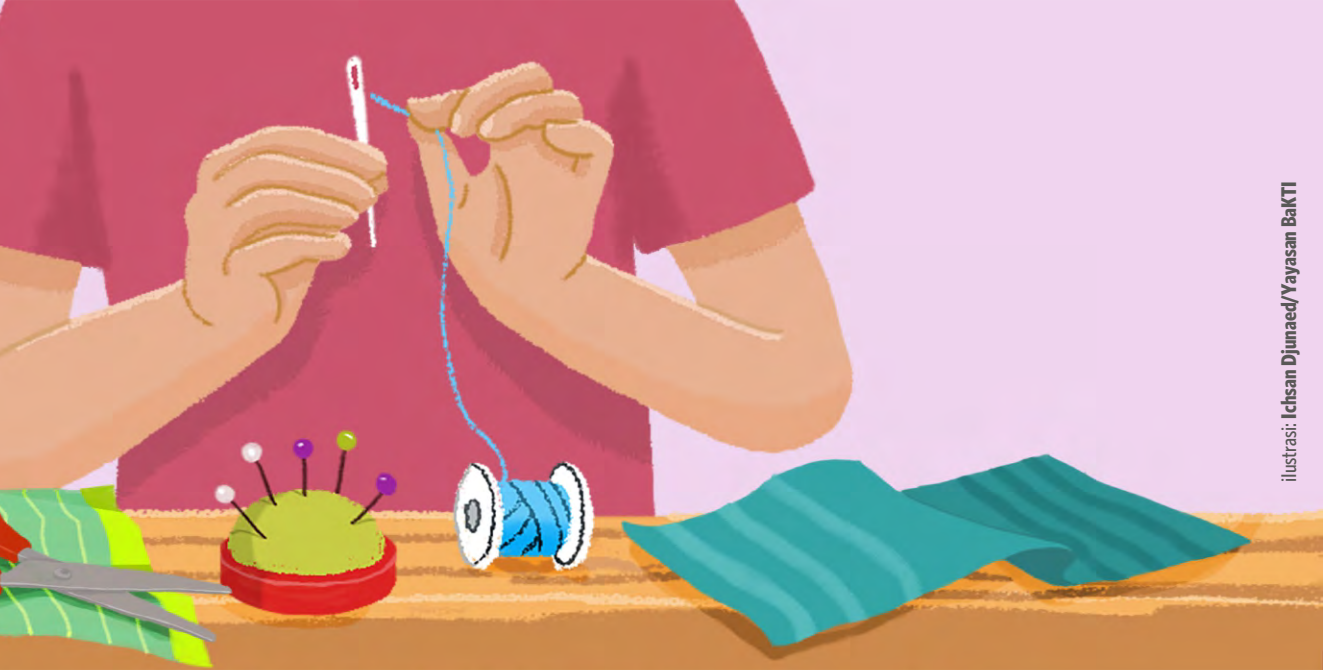
Bagi anak perempuan, sanitasi yang layak merupakan prasyarat penting untuk memastikan partisipasi yang aman dan sehat di sekolah. Sanitasi dalam hal ini menyangkut persediaan dan fasilitas air, dan kebersihan sekolah. Penelitian UNICEF pada tahun 2015 menunjukkan bahwa satu dari enam anak perempuan di Indonesia tidak masuk sekolah saat menstruasi, seringkali karena pembalut kurang dan toilet tidak terpisah berdasarkan jenis kelamin, akibatnya siswi tidak dapat mengelola menstruasi dengan nyaman. Sebuah studi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan dukungan dari UNICEF menunjukkan bahwa satu dari tiga sekolah di Indonesia tidak memiliki toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Di banyak wilayah di Indonesia, budaya patriarki masih dipegang oleh masyarakat seperti halnya juga di Papua. Hal ini menjadikan menstruasi dan perihal kesehatan reproduksi



lainnya menjadi topik yang tabu dan belum terbuka untuk dibicarakan, apalagi untuk kalangan laki-laki. Adalah Demianus Dike atau yang kerap disapa Demi mampu mendobrak hal yang selama ini sulit dibicarakan di ruang terbuka menjadi salah satu materi edukasi di sekolah-sekolah Papua. Demi merupakan salah satu staf Yayasan Noken Papua, sebuah organisasi non-pemerintah lokal didirikan tahun 2013 yang berfokus pada pembangunan kesehatan dan pendidikan di Papua.

Fakta tentang membolosnya siswi di beberapa sekolah di Papua pada saat menstruasi karena fasilitas sanitasi yang tidak memadai membuat



Demi prihatin dan bertekad untuk mengubah hal ini. Demi memahami pentingnya kesehatan dan kebersihan menstruasi serta membantu anak perempuan mengelola menstruasi dengan aman dan nyaman.

“Penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa perempuan di sekolah agar bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman dan tenang” kata Demi.

Bagaimana Implementasi di Lapangan?

Pada salah satu sekolah yang dikunjungi Demi dan tim, mereka menemukan tidak adanya fasilitas sanitasi yang memadai bagi siswi.

Sekembalinya ke kantor ia dan tim mulai mendiskusikan apa yang mereka dapat lakukan untuk membantu. Dari sini ide membuat pembalut kain tercetus. Saat itu, baik Demi maupun tim Yayasan Noken Papua belum mengetahui cara membuatnya, selain tidak punya pengetahuannya Demi juga di awal ragu dan tidak percaya diri sebagai laki-laki. Demi dan tim lalu bekerja sama dengan Biyung Indonesia, sebuah organisasi non pemerintah yang dikenal aktif mengkampanyekan isu kesehatan reproduksi melalui penggunaan pembalut kain.

Kepedulian Demi terhadap kesehatan dan kebersihan menstruasi diimplementasikan

“Kadang laki-laki ini ketika ada teman perempuan yang menstruasi mereka mengejek. Laki-laki di sini dilibatkan sangat penting untuk memahami bahwa perempuan menstruasi itu adalah hal yang wajar”

dengan mengajarkan masyarakat, siswa, guru hingga kepala sekolah tentang Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi (MKM). Dari *sharing* ilmu dengan Biyung Indonesia-khususnya dalam pembuatan pembalut kain-Demi mengajarkan guru dan siswa membuat pembalut yang bisa dipakai berulang dari kain. Kain yang digunakan adalah bahan yang tersedia di lingkungan siswa dan siswi sendiri.

Sekolah yang menjadi dampingan Demi dan Yayasan Noken Papua berada di Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Manteng, Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura sendiri.

Diceritakan Demi, bahwa di awal memperkenalkan pembalut kain ke siswa ia menemui tantangan seperti perasaan malu, tidak percaya diri dan takut adanya penolakan dari siswa dan guru. Namun ia membulatkan tekad seraya meyakinkan diri bahwa sebagai laki-laki pun dia perlu terlibat dalam isu ini. Ia berharap anak perempuan, khususnya di Papua dapat menyadari hak mereka atas akses kesehatan dan kebersihan di sekolah terlebih saat mereka sedang menstruasi.

Mengapa pembalut kain? ide ini muncul tidak terlepas dari fakta yang ditemui di lapangan. Pada sekolah yang jauh dari kota, siswa kesulitan mengakses pembalut pabrikan karena toko jauh. Dengan pembalut kain, siswi dapat membuat sendiri. Selain itu keunggulan pembalut kain



karena bisa dicuci cukup dengan sabun bayi atau sabun biasa, dapat dipakai berulang-ulang, dan aman bagi lingkungan karena tidak dibuang setelah pakai seperti pembalut pada umumnya.

Membuat pembalut kain adalah bagian dari materi Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM). Dalam materi ini Demi dan tim mengajarkan tentang bagaimana pengelolaan kebersihan pada saat perempuan mengalami menstruasi. Dalam prosesnya, edukasi lebih difokuskan ke siswi tapi siswa juga selalu dilibatkan. Menurut Demi, siswa laki-laki ini sangat penting dilibatkan supaya mereka memahami bagaimana cara memperlakukan teman perempuannya ketika mereka mengalami menstruasi. “Kadang laki-laki ini ketika ada teman perempuan yang menstruasi mereka mengejek. Laki-laki di sini dilibatkan sangat penting untuk memahami bahwa perempuan menstruasi itu adalah hal yang wajar” ungkap Demi. Cerita Demi, siswa laki-laki



menerima materi dengan baik. Mereka sangat senang ketika kelas praktik menjahit pembalut, bahkan kadang mereka selesai menjahit lebih dulu.

Tak hanya siswa, guru juga berpartisipasi dalam pelatihan bersama-sama dengan siswanya. Mereka merasa terbantu karena menurutnya pembalut kain yang bisa dipakai berulang kali ini menjadi solusi bagi sekolah karena mudah disiapkan, lebih murah, dan ramah lingkungan.

Selain berkegiatan di sekolah, isu kesehatan reproduksi juga diadvokasi ke puskesmas dan kampung-kampung. Materi yang disampaikan di antaranya terkait kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanggulangan kehamilan remaja, HIV-AIDS dan tentunya tidak lepas dari tema manajemen kesehatan menstruasi.

Perubahan yang terjadi

Tentunya kegiatan Demi dan Yayasan Noken Papua bersama siswa dan guru-guru di sekolah memberikan perubahan positif. Menurut Demi, dari hasil observasi dan wawancara dengan guru diketahui bahwa dari 10 peserta laki-laki 5 sudah bisa menjahit sendiri bahkan mereka sudah siapkan semua pembalut-pembalut hasil buaatannya untuk sekolah. Mereka sudah paham dan berjanji tidak akan mengganggu teman perempuan yang sedang menstruasi.

Untuk siswa perempuan, mereka kini sudah merasa nyaman dengan tersedianya pembalut kain di sekolah. Terlebih lagi sekolah sudah mulai membenahi fasilitas toilet yang terpisah. “Tadinya mereka pergi karena tidak ada ketersediaan air, mereka kadang pilih bolos. Tapi setelah diedukasi, diberi pelatihan membuat pembalut kain dan

mereka mulai nyaman dan dapat belajar dengan tenang meski sedang menstruasi” ungkap Demi.

Secara pribadi, Demi merasa bangga ketika sekolah dampungannya mampu mengimplementasikan pengetahuan yang telah ia bagi bersama timnya.

Harapan Demi

Demi berharap semua pendidikan yang ada di tanah Papua mampu menciptakan inovasi-inovasi baru terkhusus sekolah-sekolah di kampung, utamanya terkait manajemen kesehatan menstruasi. Yang terpenting ia berharap siswa - siswi, guru, sekolah dan masyarakat pada umumnya mampu menghilangkan mitos dan stigma yang terus berkembang seputar menstruasi di kalangan pelajar.

Demi adalah bukti bahwa laki-laki, khususnya di Papua, dapat memahami pentingnya kesehatan dan kebersihan menstruasi serta dapat mengambil peran dalam membantu anak perempuan mengelola menstruasi dengan aman dan nyaman. Ia berharap setelah mengikuti pelatihan, siswa, guru, dan kepala sekolah dapat melakukan kegiatan Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi (MKM) di sekolahnya sehingga tidak ada lagi anak perempuan yang harus bolos dari sekolah saat menstruasi. Dibutuhkan lebih banyak lagi Demianus Dike lainnya yang mau terlibat dalam proses edukasi kesehatan reproduksi ini untuk pendidikan siswa/siswi di Papua yang lebih baik.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai inisiatif ini dapat menghubungi:
Yayasan Noken Papua
Email: tongpunoken@gmail.com



Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Yayasan BaKTI sebagai mitra nasional Program INKLUSI dan Pemerintah Kabupaten Maros.
Foto: Dok Yayasan BaKTI/INKLUSI

BERSINERGI MENUJU MASYARAKAT INKLUSIF

Oleh
M. GHUFRAN H. KORDI K.

Pembangunan inklusif atau pembangunan yang terbuka untuk semua adalah, pembangunan yang membuka akses terhadap layanan pemerintah dan layanan publik bagi semua individu dan kelompok, memberi dan membuka ruang partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi individu dan kelompok dalam pembentukan kebijakan dan pemanfaatan sumber-sumber pembangunan.

Inklusi dan inklusif menjadi isu dan tema yang semakin populer seiring pendekatan pembangunan yang menekankan pada hak asasi dan transformasi sosial. Pendidikan inklusi/inklusif, keuangan inklusi/inklusif, beragama secara inklusif, pembangunan inklusif, dan seterusnya adalah istilah-istilah yang semakin mudah diucapkan oleh pelaku pembangunan. Inklusi adalah proses, metode, atau pendekatan yang terbuka (inklusi) untuk semua. Sedangkan inklusif adalah bentuk kata sifat yang menunjuk pada kondisi yang bersifat inklusif atau suatu kondisi yang dicita-citakan untuk dicapai.

Sebagai proses dan pendekatan, inklusi mensyaratkan pelibatan dan partisipasi semua kelompok sosial dalam proses pembangunan. Kelompok miskin, marjinal, minoritas, dan rentan yang selama ini hanya diatasnamakan dan legitimasi di dalam dokumen, tidak hanya diberi akses dan ruang, tetapi juga harus diberdayakan untuk ikut menjadi bagian proses inklusi menuju masyarakat inklusif.

Program INKLUSI-BaKTI

Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) adalah salah satu dari berbagai program yang menggunakan pendekatan inklusi menuju masyarakat inklusif. Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra nasional Program INKLUSI, fokus pada isu kekerasan (perempuan dan anak), disabilitas atau difabel, lanjut usia (lansia), perempuan kepala keluarga, dan kelompok minoritas, marjinal, dan rentan di wilayah program.

Sebagai sebuah program, maka Program INKLUSI-BaKTI harus mencakup kondisi di masing-masing wilayah, misalnya ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) di Parepare. OYPMK (orang yang pernah menyandang kusta) di Ambon, penganut agama lokal dan minoritas di Lombok Timur dan Ambon. Di Kabupaten Kupang, perempuan hamil adalah kelompok yang dianggap rentan karenanya diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan.

Dalam pelaksanaan Program INKLUSI, Yayasan BaKTI dan mitra daerah bekerja sama dengan empat *stakeholders* kunci, yaitu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), eksekutif (khususnya organisasi perangkat daerah/OPD terkait), media massa, dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan melalui kelompok konstituen.

Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai otoritas dalam pembentukan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, kerja sama dengan DPRD dimaksudkan untuk menjembatani usulan pembentukan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan pada implementasi program-program inklusi.

Sementara eksekutif (OPD terkait) adalah pembuat dan pelaksana program. Karenanya kerja sama dengan eksekutif diharapkan mendukung dan memperkuat program inklusi.

Jurnalis dan media adalah salah satu pilar demokrasi yang dapat menjadi institusi kontrol terhadap pembangunan, kesadaran publik (melalui pemberitaan yang kritis dan mendidik), dan sebagai jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya kepada pembuat kebijakan. Sedangkan masyarakat yang bergabung dalam Kelompok Konstituen adalah kelompok kritis dan berdaya di tingkat desa/kelurahan yang menjadi mitra pemerintah desa dalam pengembangan komunitas dan desa inklusi.

Perjanjian Kerja Sama

Program INKLUSI melanjutkan kemajuan yang telah dicapai di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Di dalamnya termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif. Program ini disinkronkan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di wilayah program, serta melanjutkan program pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial, termasuk gerakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.

Karena itu, pelaksanaan Program INKLUSI-BaKTI dimulai dengan perjanjian kerja sama antara Yayasan BaKTI atau mitra BaKTI di daerah dengan ketua DPRD dan bupati/walikota. Perjanjian kerja sama ini untuk menyediakan legalitas program, sekaligus mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah daerah.

Sebagai sebuah program yang diharapkan berkontribusi pada daerah, maka program tersebut harus diakui dan mendapatkan legalitas dari pemerintah. Perjanjian kerja sama juga penting sebagai penanda dimulainya program, sehingga



dalam waktu tertentu perlu dilakukan evaluasi untuk menilai capaian program, dan jika program menghasilkan sesuatu yang dianggap baik, maka itu adalah capaian bersama.

Menyusun Program Bersama

Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, dilanjutkan dengan penyusunan Program INKLUSI, baik dengan DPRD maupun dengan pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan program yang dilakukan secara bersama dimaksudkan untuk melihat hasil akhir yang menjadi tujuan Program INKLUSI-BaKTI, dan program-program di pemerintahan yang memungkinkan untuk dikolaborasikan untuk saling mengisi dan menguatkan.

Sebagai sebuah program yang dibuat untuk jangka yang cukup panjang (sekitar 7 tahun) dan merupakan bagian dari program nasional, Program INKLUSI-BaKTI disusun berdasarkan data, pengalaman, dan diskusi yang cukup panjang. Namun, program tersebut perlu penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perubahan dan dinamika yang terjadi.

Penyusunan program bersama ini diperlukan karena, baik tujuan program maupun penerima

manfaat Program INKLUSI-BaKTI beririsan dengan program dan kegiatan beberapa OPD. Di pihak lain, Program INKLUSI-BaKTI adalah program yang hanya berlangsung dalam waktu tertentu. Karena itu, Program INKLUSI-BaKTI haruslah merupakan program yang selaras dengan program pemerintah pusat dan daerah. Jika pun Program INKLUSI-BaKTI menghasilkan sesuatu yang dianggap praktik baik dan inovatif, maka inovasi tersebut perlu direplikasi dan dilanjutkan pemerintah.

Keberlanjutan adalah *point* penting dalam penyusunan dan pelaksanaan Program INKLUSI-BaKTI, karena itu penyusunan dan pengembangan program harus dilakukan dengan pemerintah, yang mempunyai sumber daya dan sumber dana untuk melanjutkan Program INKLUSI-BaKTI ini.

Desa Inklusif

Salah satu *stakeholders* kunci dalam Program INKLUSI-BaKTI adalah kelompok konstituen di tingkat desa/kelurahan. Kelompok konstituen adalah organisasi di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk dan dikuatkan sebagai wadah untuk penyadaran kritis mengenai hak-hak warga negara, penguatan kelompok untuk akses



pada layanan publik pemerintah, dan sebagai lembaga advokasi untuk hak-hak kelompok miskin, marginal, minoritas dan rentan.

Penggunaan istilah “konstituen” ini untuk menunjukkan bahwa masyarakat adalah konstituen yang mempunyai wakil di parlemen (DPR, DPD, dan DPRD). Dengan begitu, kepentingan dan kebutuhan mereka sebagai warga negara dijamin oleh wakilnya di parlemen. Namun, sebagai konstituen, mereka harus menjadi konstituen yang kritis dan berdaya, baik sebagai warga negara maupun sebagai pemilih.

Kelompok Konstituen inilah yang diperkuat untuk menjadi motor bagi pembentukan dan pengembangan desa inklusi. Desa inklusi adalah yang dibangun dengan membuka ruang untuk pelibatan dan partisipasi semua kelompok dan komponen yang berada di desa. Kelompok-kelompok yang merupakan kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan yang sebelumnya mengalami eksklusi atau tereksklusikan, harus dirangkul dan diberi ruang yang sama sebagai warga desa dan warga negara, untuk mengakses layanan pemerintah dan ikut berkontribusi dalam pembangunan desa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara: ① Yayasan Rumpun Perempuan Sultra (mitra daerah Program INKLUSI) dengan Pemerintah Kota, ② Rumah Generasi dengan Pemerintah Kota dan DPRD Kota Ambon, ③ Yayasan BaKTI dengan Pemerintah Kota dan DPRD Kota Maros ④ Lombok Research Centre dengan DPRD Kab. Lombok Timur ⑤ YLP2M dengan dengan Pemerintah dan DPRD Kab. Parepare
Foto: Dok Yayasan BaKTI/INKLUSI

Pengembangan desa inklusi sebagai desa model untuk layanan publik dan pembangunan inklusi, bukan untuk mengubah perencanaan dan anggaran desa yang telah ada dan selama ini dipraktikkan, melainkan hanya menjadikannya lebih Inklusi. Penyusunan program atau kegiatan inklusi haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang penyusunan menggunakan metode yang inklusi. Setidaknya menggunakan analisis atau melihat aspek-aspek yang perlu dipenuhi, yakni bagaimana memberi akses dan melibatkan kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan. Pembangunan adalah pemenuhan hak-hak warga tanpa diskriminasi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

MENGAKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, BAGAIMANA LAKI-LAKI BERPERAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER?

Oleh **HAFIDIN**

K

ekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan terutama sejak awal pandemi. Hal itu berdampak pada kualitas kesetaraan gender yang masih harus ditingkatkan demi terciptanya ruang aman bagi perempuan yang sering menjadi korban.

Kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis di era pandemi, tercatat ada 2.500 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021 sebagaimana dikutip *Plain Feminism* dari Komnas Perempuan. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2.300 kasus.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang harus diakhiri sebagaimana yang diupayakan oleh para aktivis kemanusiaan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Mengutip dari Savy Amira, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/ penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993, termasuk juga ancaman perbuatan tertentu berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan terhadap perempuan muncul karena adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan serta konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi di bawah laki-laki atau harus tunduk di bawah kuasa laki-laki (subordinasi). Kondisi demikian kita kenal juga dengan istilah konstruksi patriarki.

Konstruksi patriarki bisa menyebabkan banyak tindakan kekerasan terhadap perempuan yang sering dianggap wajar oleh para pelaku, salah satunya adalah *toxic masculinity* (sifat maskulin yang dilebih-lebihkan).

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/ penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual.



Ilustrasi: Ichsan Djmaed/Yayasan BaKTI

Patriarki secara harfiah mempunyai arti kekuasaan bapak, yaitu kekuasaan laki-laki dalam sistem keluarga yang menguasai seluruh anggota keluarga, si istri, anak-anak dan bahkan para pelayan rumah tangga harus tunduk pada laki-laki sebagai kepala keluarga.

Seiring berjalannya waktu, patriarki menjadi budaya yang mendarah daging di berbagai lini kehidupan yang dianggap wajar oleh masyarakat melalui bermacam-macam cara termasuk tradisi lokal. Pada akhirnya, memunculkan hubungan kuasa laki-laki yang menganggap bahwa menguasai dan menundukkan perempuan adalah kewajiban dan hak seorang laki-laki.

Sedangkan *toxic masculinity* adalah suatu tekanan budaya bagi kaum laki-laki untuk berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu,

seperti tuntutan untuk tidak boleh menangis, menunjukkan emosi sedih dan mengeluh, serta menganggap bahwa laki-laki hanya boleh mengekspresikan keberanian dan amarah.

Dikutip *Plain Feminism* dari Jurnal Perempuan, fakta menunjukkan bahwa 99% pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah laki-laki. Selain itu, mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan sering kali mengaku tidak mendukung tindakan tersebut.

Selain perjuangan yang dilakukan kaum perempuan untuk mengupayakan kesetaraan gender, peran laki-laki yang aktif dan konsisten untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan juga penting demi terwujudnya cita-cita feminisme berupa kesetaraan hak manusia di ruang publik tanpa memperhatikan gender seseorang.

Menurut Nur Iman Subono, laki-laki umumnya terbagi menjadi tiga golongan dalam memilih posisinya terkait isu kekerasan terhadap perempuan.

Pertama, laki-laki sebagai pelaku kekerasan yang berbasis gender. Kedua, laki-laki bukan sebagai pelaku, tapi diam dan bersikap pasif (*silent majority*) terhadap kekerasan yang dialami perempuan, pada akhirnya, cenderung membiarkan dan membolehkan kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, laki-laki sebagai yang menentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mengajak berbagai

pihak, khususnya laki-laki untuk berbuat hal yang sama (*vocal minority*).

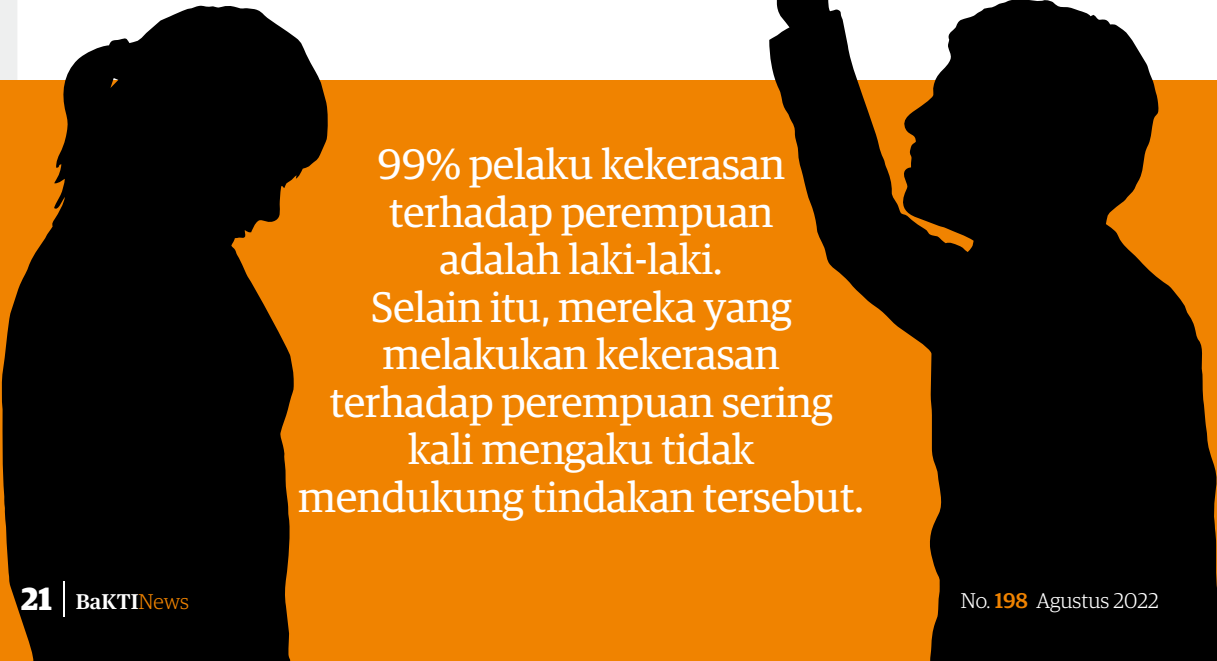
Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, laki-laki dianjurkan mengambil posisi yang ketiga karena kesetaraan gender akan terwujud jika laki-laki ikut bertanggung jawab atas bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan baik dalam rumah tangga atau kehidupan masyarakat.

Peran Laki-laki dalam Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Peran laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan feminisme bagi laki-laki dan mengajak mereka untuk lebih aktif mendukung dan melakukan nilai-nilai kesetaraan gender baik di ruang publik maupun hubungan rumah tangga.

Peran laki-laki untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan menjadi penting karena statusnya dalam budaya patriarki mendapatkan *privilege* (hak istimewa) berupa kekuasaan dan dominasi.

Menjadi laki-laki feminis berarti berupaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan sekaligus menyuarakan bahwa status *privilege*



99% pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah laki-laki. Selain itu, mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan sering kali mengaku tidak mendukung tindakan tersebut.

dalam budaya patriarki selama ini adalah salah dan perlu adanya pengaturan serta pemolaan ulang peran-peran sosial dan rumah tangga yang berbasis kesetaraan gender.

Upaya laki-laki untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan bisa dilakukan dengan menjadi laki-laki feminis yang bekerja sama dengan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui kampanye dan edukasi secara konsisten.

Di Indonesia, sudah ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum laki-laki untuk meningkatkan kesadaran laki-laki terhadap kekerasan yang dialami perempuan dan memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender.

Salah satunya adalah Aliansi Laki-Laki Baru (ALB), sebuah gerakan yang memiliki kepentingan untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta kelompok minoritas lainnya dengan cara mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender kepada masyarakat terutama kepada kelompok laki-laki.

Peran laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender bisa dilakukan dengan mengupayakan pemaknaan ulang terhadap konstruksi sosial yang ada, laki-laki harus terlibat langsung dengan melakukan komunikasi kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai feminisme serta bergabung dengan gerakan-gerakan yang menolak kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, peran laki-laki untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan juga bisa dilakukan secara persuasif dengan cara membiasakan diri untuk memilih kata-kata secara sensitif gender dalam kehidupan sehari-hari kita, kata-kata seperti *jablay* dan lainnya yang merendahkan perempuan harus dihindari.

Dengan begitu, kekerasan terhadap perempuan bisa diakhiri dengan adanya laki-laki feminis yang mendengarkan, mendukung dan merealisasikan pikiran-pikiran perempuan untuk menghilangkan hubungan yang timpang baik dalam kehidupan sosial ataupun keluarga yang sering merugikan posisi perempuan.

Hubungan yang timpang dalam kehidupan sosial bisa berupa pembatasan perempuan untuk

menjadi pemimpin baik di lembaga swasta maupun pemerintah, cowok yang mendominasi dalam pacaran karena alasan kekuatan fisik dan kejantanan, sedangkan dalam kehidupan keluarga bisa berupa perampasan hak memilih untuk berkarir dan melanjutkan pendidikan karena harus tunduk pada perintah ayah atau suami, pembenaran pernikahan dini demi tujuan status sosial yang merugikan dan mengekang perempuan.

Yang perlu diperhatikan, Jangan sampai 99% laki-laki yang merupakan pelaku kekerasan, kita sudutkan sebagai musuh secara membabi-buta, tapi juga memposisikan mereka sebagai mitra untuk mengubah budaya dan sudut pandang, karena baik laki-laki dan perempuan adalah sama-sama korban budaya patriarki.

Menurut Nur Hasyim, pendiri Aliansi Laki-Laki Baru, laki-laki sebagai pelaku kekerasan perlu mendapatkan hukuman peradilan dan proses rehabilitasi seperti mendapatkan panduan perubahan perilaku serta mengajarkan bahwa tindakannya berdampak buruk bagi kehidupan sosial.

Setiap anak yang baru lahir juga tidak pernah meminta untuk dididik dalam sistem dan budaya patriarki, maka mengakhiri kekerasan terhadap perempuan adalah tugas kita bersama.

Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan demi terwujudnya kesetaraan gender yang merupakan cita-cita feminisme, kita harus memberikan edukasi dan menyuarakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki adalah sama-sama sebagai agen moral yang bernalar.

Agen moral yang bernalar harus bekerja sama mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan berbagi peran dalam ruang publik seperti kepemimpinan, dalam keluarga seperti mengurus anak, mencuci dan memasak, serta dalam hal naluriyah sebagai manusia seperti menangis dan memiliki sifat atau perasaan yang lembut. Bukankah kita sama-sama diciptakan sebagai manusia yang bisa berpikir dan merasakan cinta?

INFORMASI LEBIH LANJUT

Sumber: <https://plainmovement.id/mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan>



CO-DESIGN
**UNTUK MENGURANGI
PUTUS SEKOLAH DI MAMUJU**

Oleh **VICTOR MATANGGARAN**

Foto: Victor Matanggaran

Berdasarkan laporan BPS Sulawesi Barat, angka putus sekolah anak usia 7-15 tahun terus mengalami peningkatan hingga mencapai 12.611 siswa pada tahun 2022. Sebagian besar anak putus sekolah setelah kira-kira delapan tahun sekolah dan jika dilihat secara statistik kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2020). Hanya sekitar 30% remaja lulusan SMA di Sulawesi Barat yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2020). Hal tersebut masih jauh dari dari tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknis, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas, pada tahun 2030. Melihat fakta masih tingginya putus sekolah di Sulawesi Barat menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian tidak hanya pemerintah namun seluruh komponen masyarakat, termasuk NGO.

Macanga Institute didukung UnionAid New Zealand melaksanakan sebuah program *co-design* di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju untuk mempelajari persoalan putus sekolah khususnya di komunitas nelayan di daerah tersebut. *Co-design* merupakan sebuah pendekatan yang mengkombinasikan riset kualitatif dan partisipasi aktif berbagai komponen masyarakat lokal dalam menciptakan solusi terkait masalah yang mereka hadapi. Pendekatan *co-design* ini dipelajari melalui program INSPIRASI yang dilaksanakan UnionAid New Zealand bekerja sama dengan BaKTI Makassar setiap tahun sejak 2018. Melalui program INSPIRASI ini juga setiap pemimpin muda yang terpilih di daerah mendapat dukungan pendanaan untuk melaksanakan program kecil di komunitas mereka.

Proyek Macanga Institute dilaksanakan di salah satu komunitas nelayan di Desa Kalukku Barat, Kabupaten Mamuju dengan dukungan penuh dari UnionAid. Terdapat 7 dusun di Kalukku Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 5000 jiwa. Mayoritas penduduk di dua dusun bekerja sebagai nelayan, penjual ikan, petani padi, pekerja bangunan, dan pekerja informal lainnya. Jarak

antara ibu kota Mamuju ke desa ini sekitar 36 KM atau memakan waktu 1 jam 30 menit berkendara dari kota.

Program *co-design* dilaksanakan dari bulan Desember hingga Maret 2022 dan melalui *co-design* ini ditemukan bahwa putus sekolah yang terjadi di salah satu komunitas nelayan banyak dipengaruhi budaya yang mengharuskan anak laki-laki membantu ayahnya bekerja menangkap ikan. Sebagian besar anak laki-laki usia 9 atau 10 tahun di salah satu sekolah dasar di desa ini banyak yang tidak aktif bersekolah atau bahkan telah putus sekolah. Kebanyakan mereka bekerja membantu orang tua utamanya ayah untuk melaut mencari ikan. Berbeda dengan anak laki-laki, kebanyakan anak perempuan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar mereka bahkan melanjutkan ke sekolah menengah pertama sebelum menikah. Di daerah ini bapak-bapak bekerja sebagian besar sebagai nelayan yang mulai bekerja mencari ikan dini hari kira-kira pukul 3 pagi paling cepat hingga sore hari. Penghasilan rata-rata tidak menentu, tergantung banyaknya ikan yang didapat. Ibu-ibu membantu suami mereka dengan berdagang ikan dan ada pula yang menjaga warung untuk menjual makanan dan minuman tradisional. Setiap hari orang tua anak di kampung nelayan ini bekerja keras dari pagi hingga malam untuk menafkahi keluarga hingga tidak sempat untuk memperhatikan kegiatan anak termasuk sekolah. Mayoritas ibu di komunitas nelayan ini juga menikah di usia yang sangat muda. Sebagian besar ibu muda (di bawah 18 tahun) menikah sebelum menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Setiap keluarga di kampung nelayan ini memiliki 5-9 anak, sangat jarang jumlah anak dalam sebuah keluarga kurang dari 5 anak. Sekilas persoalan putus sekolah ini adalah karena masalah ekonomi tetapi jika melihat gaya hidup maupun budaya masyarakat setempat dan ditambah program bantuan sosial pemerintah untuk pendidikan di daerah ini, ekonomi bukanlah alasan utama dan satu-satunya.

Berdasarkan gambaran permasalahan yang ditemui dalam penelitian awal, ternyata ada banyak aktor dan faktor yang telah membentuk sistem di masyarakat. Salah satu yang menjadi keprihatinan Macanga Institute adalah sekolah yang belum mampu mengubah model pendidikan yang tepat bagi konteks dan budaya setempat.



Dapat dipahami bahwa tantangan anak dalam budaya masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan akan kesulitan mengikuti model pendidikan yang mengharuskan anak ke sekolah setiap jam 7 pagi dan pulang di siang hari. Memaksakan anak mengikuti sistem pendidikan yang telah berjalan selama ini tidak akan menguntungkan anak-anak nelayan. Mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab lain di rumah yang juga telah menjadi budaya turun temurun. Anak laki-laki harus dilatih mengarungi lautan sejak kecil untuk mempersiapkan mereka menjadi pelaut yang berani. Demikian halnya perempuan harus dapat membantu laki-laki dengan berjualan hasil tangkapan di rumah. Dalam masyarakat Mandar budaya ini dikenal dengan istilah *Sibaliparriq* yang secara sederhana merupakan budaya saling membagi beban antara suami dan istri untuk mengatasi masalah termasuk persoalan ekonomi dalam keluarga. Budaya ini yang telah mengakar dan menjadi identitas masyarakat Mandar. Memaksakan model disiplin dan pendidikan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat tidak akan membantu menyelesaikan persoalan putus sekolah di Sulawesi Barat.

Selain keluarga, sekolah terdekat dari komunitas nelayan ini kewalahan dengan kenakalan siswa. Menurut pengakuan guru-guru, siswa tidak memiliki disiplin dan tidak dapat fokus dalam belajar di sekolah. Ditambah lagi dengan kehadiran yang sangat rendah membuat guru kesulitan dalam memberikan penilaian untuk siswa. Berdasarkan studi yang dilakukan dalam *co-design* ini, beberapa kebiasaan anak yang aktif menggunakan smartphone dari usia 5 tahun dan kebiasaan begadang bermain *game online* juga menjadi masalah yang membuat anak sulit fokus di sekolah dan cenderung selalu kelelahan. Di sekolah, guru tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan siswa dan terkesan “bermusuhan” dalam aktivitas belajar setiap hari. Berdasarkan masalah yang ada di sekolah tersebut, Macanga Institute mencoba bekerja sama dengan sekolah untuk memahami kondisi siswa dan membuat pendekatan baru dalam mendisiplinkan siswa. Sekolah menjadi salah satu komponen penting dalam sistem yang dapat diintervensi dengan peluang perubahan yang lebih realistis dibanding mengubah budaya masyarakat nelayan.

Macanga Institute melaksanakan *workshop* bersama guru dalam memahami psikologi



Foto-foto: Victor Matanggaran

perkembangan anak dan mencoba mengevaluasi cara-cara lama yang dianggap kurang efektif untuk diubah. Bersama guru-guru dari sekolah dasar di desa tersebut, Macanga Institute membuat program penanganan perilaku anak yang lebih positif, fokus pada mengapresiasi kemajuan yang dilakukan anak daripada menghukum. Guru-guru secara bersama-sama sepakat untuk membuat token ekonomi untuk membantu siswa memiliki misi yang harus dicapai daripada hanya melarang siswa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mencoba untuk memikirkan program-program pembelajaran yang responsif dan sesuai dengan tantangan siswa yang berasal dari kampung nelayan seperti alternatif belajar di luar kelas dan menyusun materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan aktifitas anak nelayan sehari-hari misalnya menangkap dan menjual ikan.

Selama satu bulan percobaan, guru-guru di SD Inpres Malolo telah mampu mengurangi respons marah dan hukuman di sekolah dan menggantikannya dengan apresiasi atau hadiah-hadiah kecil bagi siswa. Hal ini penting untuk memastikan hubungan positif antara guru dan siswa agar dapat bekerja sama mencapai tujuan

pembelajaran. Guru-guru juga mampu menjadi lebih proaktif membantu siswa nya memiliki motivasi dan tujuan yang dapat dicapai di sekolah. Selama ini larangan demi larangan terbukti tidak efektif mengubah siswa dan justru membuat siswa semakin jauh dari guru. Selama satu bulan juga terlihat bahwa suasana di sekolah menjadi lebih menyenangkan bagi siswa dengan motivasi yang semakin meningkat.

Namun, program yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif untuk membuat siswa yang tingkat kehadirannya sangat rendah untuk dapat hadir secara rutin seperti siswa lainnya. Masih terdapat hal-hal dalam masyarakat termasuk pekerjaan atau kegiatan tidak terhindarkan yang harus anak-anak tersebut kerjakan. Tugas Macanga Institute selanjutnya adalah mencoba pendekatan yang lebih komprehensif di tengah masyarakat khususnya orang tua untuk dapat mengubah pandangan mereka tentang pendidikan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Founder dan Director Macanga Institute, Peserta Program INSPIRASI 2021 dan dapat dihubungi melalui victormatanggaran@gmail.com

MENIKMATI PESONA BENTANG ALAM BERBALUT BUDAYA RAMMANG-RAMMANG

Bagian I

Oleh **SLAMET RIADI**

Desa Salenrang memiliki bentang alam yang indah dan mempesona dengan sajian hamparan gugusan karst dan aliran sungai yang mengantar para pengunjung ke Kampung Berua, destinasi utama di kawasan wisata Rammang-Rammang di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Rammang-rammang sebagai bagian dari kawasan pegunungan Maros-Pangkep seluas 45 ribu hektar merupakan kawasan karst terluas di dunia setelah kawasan karst di Cina dan Vietnam.



Tidak hanya memiliki kawasan karst dengan persentase 25% dari luasan desa, jenis penggunaan lahan di Desa Salenrang juga sangat beragam yakni diantaranya 39% sawah, tambak 26%, perkebunan 0,30%, dan permukiman 3,70% dari luasan desa (Hartati, Nurlambang, dan Zulkarnain, 2020).

Potret Perayaan Maulid Rasulullah SAW 'Maudu Jolloro' yang Melintas di Sungai Pute, Ramang-rammang pada tahun 2018.
Foto: Suratman Larakuti



Dengan karakteristik bentang alam yang beragam, masyarakat Desa Salenrang khususnya Rammang-Rammang dapat hidup dan berkecukupan dari generasi ke generasi, jauh sebelum masyarakat mengenal pariwisata.

Keindahan bentang alam karst, sungai, sawah, dan tambak merupakan penanda identitas dan sekaligus 'media' lahirnya berbagai bentuk budaya di masyarakat.

Lantas, seperti apa praktik budaya yang kini menjadi pengetahuan bagi masyarakat Rammang-Rammang, utamanya yang berkaitan dengan aspek lingkungan atau bentang alam yang telah memberi mereka kehidupan?

Jaga Karst, Jaga Kehidupan: Pesan Leluhur

Sekitar 15 tahun yang lalu, hutan batuan karst Rammang-Rammang hampir dieksplotasi besar-besaran oleh tiga perusahaan asal Tiongkok yang telah mengantongi izin usaha pertambangan, tepatnya pada tahun 2007.

Hingga pada tahun 2013 atas tekanan dari berbagai pihak, terutama masyarakat Desa Salenrang yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Salenrang (PRS), izin ketiga perusahaan tersebut akhirnya dicabut.

Perjuangan masyarakat Desa Salenrang melindungi kawasan karst dijelaskan Muhammad Ikhwan atau akrab disapa sebagai Iwan Dento sebagai upaya untuk menjaga kehidupan dan identitas mereka.

"Kalau karst itu dirusak, maka semua kehidupan disini akan ikut rusak. Mulai dari sumber air, pohon, flora-fauna, sampai identitas kami juga akan hilang," katanya saat ditemui di rumahnya pada akhir Maret 2022.

Kini, apa yang diyakini Iwan Dento dan masyarakat Desa Salenrang terbukti. Kawasan karst Rammang-Rammang memang berperan hidrologi penting dalam mengatur keseimbangan air permukaan dan bawah tanah, penyedia sumber air bagi masyarakat desa, memberikan tambahan pemasukan bagi masyarakat melalui pariwisata, dan menyimpan sejarah pengetahuan manusia purba Sulawesi.

Pada awal tahun 2022, saya bertemu dengan Daeng Are, salah satu pengelola dan penjaga mata



air Rammang-Rammang yang bersumber dari gunung Bulu Ballang (gunung putih). Saat itu, saya sedang mengerjakan sebuah penelitian mengenai tata kelola air yang berhasil dilakukan di Desa Salenrang.

Rumah Daeng Are berada tidak jauh dari gunung Bulu Ballang yang berada di sebelah utara Desa Salenrang. Menurutnya, karst Rammang-Rammang telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi penduduk desa, utamanya menyangkut soal air bersih. "Gunung-gunung (*karst*) disini telah memberi 'berkah' dan 'manfaat' bagi orang disini," katanya.

Selain manfaat yang dirasakan, masyarakat sekitar gunung Bulu Ballang ternyata juga mempercayai satu pesan dari leluhur yang berbalut teka-teki dan perumpamaan.

"Orang sini punya kepercayaan tentang Bulu Ballang. Dulu kata nenek-nenek (leluhur) kami, kalau ada batunya jatuh maka mereka percaya akan ada orang yang meninggal di desa," jelas Daeng Are.

Artinya kerusakan kawasan pegunungan karst Maros bakal berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Rammang-rammang. "Pada intinya, kami (warga) di kampung ini wajib melindungi gunung-gunung disini. Itu pesan yang disampaikan kepada kami," pungkasnya.

Sedangkan Daeng Ali (60 tahun), sesepuh di Kampung Massaloeng, Desa Salenrang yang ditemui akhir Maret 2022, bercerita tentang pesan atau amanah orang tuanya agar menjaga kawasan pegunungan karst karena telah memberikan mereka kehidupan.



Bulu Ballang (Gunung Putih), sumber mata air tiga desa di Kecamatan Bontoa, termasuk kawasan Rammang-Rammang.
Foto: **Nurul Fadli Gaffar**

“Sekarang masuk Bosowa (pabrik semen yang berlokasi di Kabupaten Maros yang mengeksploitasi kawasan karst Rammang-rammang) yang merusak gunung sebelah kampung ini. Kalau Bulu Barakka’ dihancurkan, Salenrang bisa tenggelam, karena disitu tersimpan mata air besar yang tembus langsung dari laut,” ucap Daeng Ali dalam bahasa setempat.

Menurut Daeng Ali, Bulu Barakka’ yang berarti gunung yang memberi keberkahan merupakan tempat masyarakat Desa Salenrang berkebun dan bercocok tanam karena tanahnya yang subur. “Seperti namanya membawa barakka’ (berkah) bagi orang disini,” katanya.

Rasa takjub Daeng Ali terhadap pesona dan jasa lingkungan gunung Bulu Barakka’ yang berada di selatan Desa Salenrang semakin bertambah,

sebab ia telah menyaksikan betul bagaimana dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat ketika kawasan karst itu dieksploitasi.

“(Aktivitas pertambangan perusahaan semen) Bosowa itu dekat sekali dari sini. Getaran dan abunya juga sampai disini. Abunya itu merusak karena biasa turun atau bercampur air hujan yang kami konsumsi. Monyet juga tambah banyak turun ke pemukiman, naik ke rumah-rumah. Mungkin karena rumahnya (habitatnya) sudah diganggu. Padahal tambang Bosowa agak jauh dari kampung, bagaimana kalau itu tambang ada di kampung, pasti semakin mengganggu kehidupan disini,” pungkasnya.

Sebenarnya, tidak hanya *Bulu Ballang* dan *Bulu Barakka’* yang memiliki pesan kuat mengenai keberlangsungan hidup masyarakat maupun biota yang ada di Rammang-Rammang. Salah satu bukit karst, *Bulu Barayya’* (gunung perkampungan binatang), berada di sebelah selatan Kampung Massaloeng juga dipercaya sebagai rumah atau tempat tinggal berbagai macam hewan dan konon dihuni oleh seekor kerbau besar.

Dari kisah yang dicitrakan Daeng Are dan Daeng Ali, menunjukkan bahwa eksistensi kawasan hutan karst Rammang-Rammang tidak hanya tampil secara fisik, namun juga mewujud dalam suatu kepercayaan simbolik masyarakat Salenrang, terkhusus Rammang-Rammang. Kepercayaan simbolik inilah yang memiliki arti atau pesan kuat mengenai pentingnya menjaga warisan leluhur yang telah memberi mereka kehidupan.

(Bersambung)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Para penulis:

Slamet Riadi (Memet). Alumni magister Antropologi UGM Yogyakarta merupakan peneliti kajian antropologi ekologi dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan.

Nurul Fadli Gaffar. Fotografer lepas di Sulawesi Selatan

Tulisan ini merupakan seri liputan Rammang-Rammang yang didukung oleh Mongabay Indonesia

Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2022/07/09/menikmati-pesona-bentang-alam-berbalut-budaya-rammang-rammang/>

DATA BICARA: PROGRAM KB TURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DALAM 50 TAHUN TERAKHIR DI INDONESIA

Oleh **AHMAD NURHASIM**

Foto: Dok. BASICS



Program Keluarga Berencana melalui alat kontrasepsi modern sebagai upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk mulai diperkenalkan secara besar-besaran kepada dunia pada 1960-an.

Badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga donor dari negara maju, dan institusi pembangunan global mempromosikan kebijakan pengendalian penduduk ini kepada negara berkembang yang kala itu angka pertumbuhan penduduknya tinggi. Setelah tiga dekade, pada 1998, 92% pemerintah di dunia mendukung akses alat kontrasepsi untuk mengendalikan penduduk.

Di Indonesia, pada akhir 1960-an di bawah pemerintahan Presiden Soeharto mulai intensif mempromosikan program KB di tengah naiknya kemajuan ekonomi Indonesia. Setelah Suharto runtuh pada 1998, program ini terus berjalan walau kurang terdengar kencang dibanding era sebelumnya. Walau demikian, program KB telah terbukti mencegah kelahiran dan menurunkan kematian ibu pada kehamilan berisiko.

Riset terbaru dari Budi Utomo, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan koleganya menunjukkan program KB berhasil menekan angka kelahiran tahunan pada level yang relatif stabil antara 4,6 juta-5,2 juta baik pada masa

Orde Baru maupun pada masa Reformasi. Padahal, jumlah perempuan usia subur meningkat signifikan dari 55 juta pada 1970 menjadi 71 juta pada 2017.

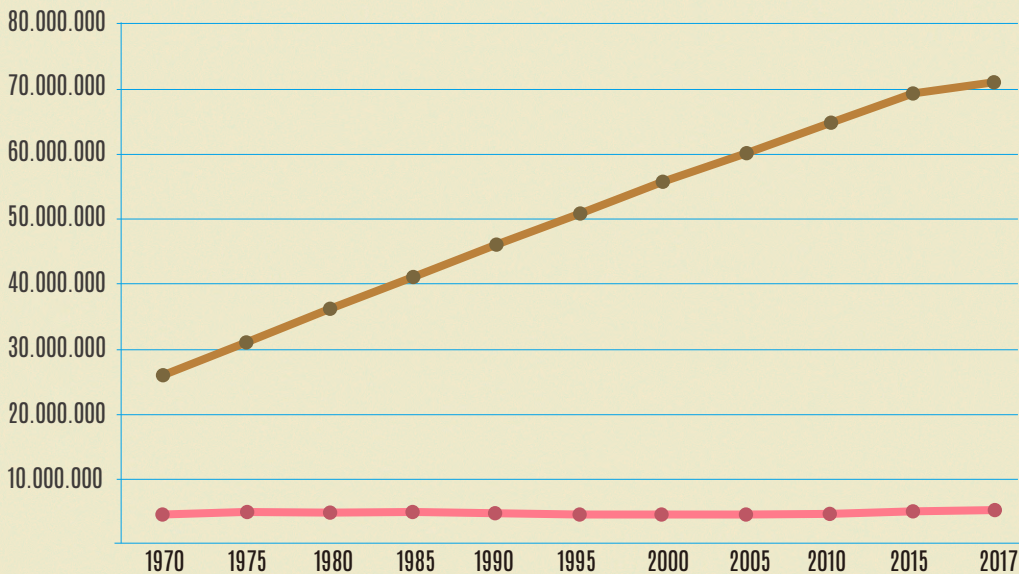
Walau jumlah usia perempuan subur meningkat hampir 40% dalam, jumlah kelahiran relatif stabil pada kisaran plus-minus lima juta per tahun. Menurut Budi Utomo, salah satu penyebabnya adalah level kesuburan umum (GFR) perempuan menurun signifikan dari 177 pada 1970, lalu 83 pada 2000 dan menjadi 73 pada 2017. Artinya dari setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun dalam setahun ada kelahiran 73 bayi. "Level kesuburan dipengaruhi oleh program KB, aborsi, dan usia perkawinan yang meningkat," kata Budi, 29 Juni 2022.

Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan telah naik dari sekitar 19 tahun pada 1970 ke 22 tahun pada 2017. Artinya jika masa subur perempuan usia 15-49 tahun, peningkatan usia perkawinan menurunkan masa kesuburan saat mereka menikah.

Level pemakaian kontrasepsi di kalangan perempuan menikah juga naik dari 8% pada awal 1970-an menjadi 60% (2002) dan 63% (2017). Sedangkan data aborsi sulit didapat. Konsensus global telah menunjukkan bahwa kematian ibu terkait kehamilan bisa diturunkan melalui empat strategi: (1) program keluarga berencana dengan

Jumlah perempuan usia subur naik dan angka kelahiran relatif stagnan dalam 50 tahun di Indonesia

■ Jumlah perempuan usia subur ■ Jumlah kelahiran



pelayanan kesehatan reproduksi, (2) perawatan yang profesional selama kehamilan dan persalinan, (3) perawatan kebidanan darurat yang tepat waktu, dan (4) perawatan segera setelah melahirkan.

Jika tiga intervensi lainnya terjadi pada ibu yang sedang hamil, program KB mengurangi kematian ibu dengan cara mencegah kehamilan dan mengurangi atau menurunkan kehamilan berisiko seperti pada perempuan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan anak atau interval kelahiran yang dekat. “KB sangat bermanfaat untuk mencegah kehamilan, jika sudah hamil maka itu peran layanan kesehatan yang bisa menurunkan angka kematian ibu,” ujarnya.

Riset Budi Utomo menunjukkan dalam hampir 50 tahun terakhir, 1970-2017, diperkirakan sekitar 523.000 sampai 663.000 kematian ibu terkait melahirkan bisa dicegah berkat penggunaan alat kontrasepsi. “Angka ini setara dengan menurunkan kematian ibu antara 37,5 sampai 43%,” kata Budi dalam riset tersebut.

Menurut studi ini, KB bisa membantu untuk menurunkan angka kematian ibu pada 2030 jadi 70 kematian ibu per 100.000 hidup kelahiran, seperti target *Sustainable Development Goals* (SDGs), jika penggunaan kontrasepsi ditingkatkan dan angka dengan KB diturunkan.

Dalam simulasi riset ini, jika tingkat penggunaan kontrasepsi (CPR) naik dari 63% pada 2017 menjadi 70% pada 2030 dan perempuan nikah yang tak ingin punya anak lagi tapi tidak memakai alat kontrasepsi (*unmet need*) turun dari 10% menjadi 7% dalam periode yang sama, maka akan ada tambahan sekitar 34.000 sampai 37.000 kematian ibu akan bisa dicegah.

Ini setara dengan tambahan menurunkan kematian ibu sebesar 18,9-20%. Jika bisa menaikkan lagi pemakaian kontrasepsi, misalnya sampai 90%, maka akan makin tinggi kematian ibu yang bisa dicegah. “Masalahnya, angka pemakaian alat kontrasepsi tidak merata karena ada masalah akses pada layanan alat kontrasepsi. Ada yang tinggi cakupannya, ada yang sangat rendah,” kata Budi.

Pada 2017 angka kematian ibu di Indonesia masih 177 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Karena cukupan alat kontrasepsi sudah relatif tinggi dan ada tantangan besar untuk menaikkannya, maka untuk menurunkan jadi 70 kematian pada 2030 akan tergantung pada keefektifan sistem kesehatan dalam menangani risiko kesehatan pada perempuan yang hamil dan begitu mereka melahirkan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

The Conversation Indonesia. Artikel asli dapat dibaca di sini <https://bit.ly/programKBturunkanangkakematianibu>



BINGUNG DENGAN ISTILAH PERUBAHAN IKLIM? BERIKUT 7 ISTILAH UMUM & ARTINYA

Oleh
WÄNDI BRUINE DE BRUIN, PhD

Ketika para ilmuwan dan penulis kebijakan berbicara tentang perubahan iklim, banyak istilah teknis yang dilontarkan: adaptasi, netral karbon, pembangunan berkelanjutan. Bahasanya bisa terasa sulit dimengerti.

“Kedengarannya seperti Anda sedang membicarakan orang,” kata seseorang tentang terminologi tersebut dalam studi terbaru melalui *USC Dornsife Public Exchange* yang dikerjakan oleh saya dan rekan kerja.

Laporan resmi tentang perubahan iklim mungkin sulit dipahami oleh non-ilmuwan. Dengan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim merilis laporan baru tentang mitigasi dan adaptasi, kami pikir akan sangat



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

membantu untuk mengklarifikasi beberapa istilah paling umum yang digunakan untuk menggambarkan perubahan iklim.

Kami mewawancarai 20 orang tentang istilah umum yang digunakan oleh ilmuwan iklim dan jurnalis iklim. Kami kemudian menggunakan umpan balik mereka untuk menjelaskan istilah-istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Dengan bantuan dari United Nations Foundation, kami memilih delapan istilah dari laporan yang ditulis oleh Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim.

Berikut panduan yang dapat membantu Anda mengikuti berita tentang perubahan iklim. Penjelasan setiap istilah dimulai dengan definisi teknis dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Teks berikut menempatkannya ke dalam bahasa sederhana.

1 MITIGASI (Mitigation)

Definisi resmi IPCC:

Mitigasi (perubahan iklim): intervensi manusia untuk mengurangi emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca.

Terjemahan:

Menghentikan perubahan iklim agar tidak semakin parah.

Ketika orang berbicara tentang ‘mitigasi’ dalam perubahan iklim, ini biasanya mengacu pada bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak, dan gas alam yang digunakan untuk menghasilkan listrik dan menjalankan mobil, bis, dan pesawat. Bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida. Ketika gas-gas ini dilepaskan, mereka akan berlama-lama di atmosfer, kemudian menjebak panas dan membuat planet bumi semakin panas.

Beberapa cara untuk menahan laju perubahan iklim adalah dengan menggunakan tenaga surya dan angin ketimbang pembangkit listrik tenaga batu bara; membuat bangunan, peralatan dan kendaraan lebih hemat energi sehingga menggunakan lebih sedikit listrik dan bahan bakar; dan merancang kota agar warga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Melindungi hutan dan menanam pohon juga dapat membantu menahan laju perubahan iklim karena pohon dapat menyerap gas rumah kaca dari atmosfer dan menguncinya.


2 ADAPTASI (Adaptation)

Definisi resmi IPCC:

Dalam sistem manusia, proses penyesuaian terhadap iklim dan dampaknya, untuk mengurangi kerugian atau memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Dalam sistem alami, proses penyesuaian terhadap iklim aktual dan pengaruhnya; intervensi manusia dapat memfasilitasi penyesuaian terhadap iklim yang diharapkan dan dampaknya.

Terjemahan:

Membuat perubahan untuk hidup dengan dampak perubahan iklim.



Perubahan iklim sudah terjadi. Gelombang panas, kebakaran hutan, dan banjir semakin parah. Manusia harus menemukan cara untuk hidup dengan ancaman ini. Los Angeles, misalnya, menanam pohon untuk membuat udara tetap sejuk. Kota-kota pesisir seperti Miami mungkin membutuhkan pemecah gelombang untuk melindungi dari banjir. Lebih banyak tindakan ‘adaptasi’ akan dibutuhkan saat perubahan iklim semakin memburuk.

3 PENGHAPUSAN CO² (CO² Removal)

Definisi resmi IPCC:

Metode penghilangan karbon dioksida mengacu pada proses yang menghilangkan CO² dari atmosfer dengan meningkatkan penyerapan biologis CO² atau menggunakan proses kimia untuk mengikat CO² secara langsung. CDR diklasifikasikan sebagai jenis mitigasi khusus.

Terjemahan:

Mengambil karbon dioksida dari udara.

Jumlah karbon dioksida di udara telah meningkat selama bertahun-tahun. Pada 2019, ada 50 persen lebih banyak daripada di akhir 1700-an. Menanam pohon dan memulihkan padang rumput dapat menghilangkan karbon dioksida dari udara. Ada juga teknologi penghilangan karbon dioksida yang menyimpannya di bawah tanah atau di beton, tetapi ini baru dan tidak banyak digunakan.

4 KARBON NETRAL (Carbon neutral)

Definisi resmi IPCC:

Netralitas karbon tercapai ketika emisi CO² yang diciptakan oleh aktivitas manusia seimbang secara global dengan penghilangan karbon dioksida antropogenik selama periode

tertentu. Netralitas karbon juga disebut sebagai emisi karbon dioksida nihil (*net-zero*).

Terjemahan:

Tidak menambahkan CO² bersih ke udara. Tetapi ini tidak berarti Anda tidak dapat menambahkan CO²; itu hanya berarti jika Anda menambahkannya ke udara, Anda harus mengeluarkan jumlah yang sama.

IPCC memperingatkan bahwa dunia harus netral karbon pada tahun 2050 untuk menghindari krisis iklim yang serius. Ini berarti melakukan ‘mitigasi’ untuk mengurangi jumlah CO² yang dilepas ke udara dan mengupayakan pengurangan karbon dioksida dari udara.

5 TITIK KRITIS (Tipping point)

Definisi resmi IPCC:

Tingkat perubahan dalam properti sistem di mana sistem direorganisasi, sering kali secara tiba-tiba, dan tidak kembali ke keadaan awal bahkan jika penggerak perubahan telah dikurangi. Dalam sistem iklim, ini merujuk pada ambang batas kritis saat iklim global atau regional berubah dari satu keadaan stabil ke keadaan stabil lainnya.

Terjemahan:

Ketika sudah terlambat untuk menghentikan efek perubahan iklim.

Salah satu titik kritis yang paling banyak dibicarakan adalah runtuhnya lapisan es Antartika Barat. Beberapa penelitian menunjukkan keruntuhan ini mungkin sudah mulai terjadi. Antartika Barat sendiri menyimpan es yang cukup untuk menaikkan permukaan laut di seluruh dunia sekitar 11 Khaki (3,3 meter), dan jika semua gletser dan lapisan es mencair, permukaan laut akan naik sekitar 230 kaki (70 meter).

6 TRANSISI YANG BELUM PERNAH TERJADI SEBELUMNYA

(Unprecedented transition)

Definisi resmi IPCC:

Proses perubahan dari satu keadaan atau kondisi ke keadaan lain dalam periode waktu tertentu. Transisi dapat terjadi pada individu, perusahaan, kota, wilayah dan negara dan dapat didasarkan pada perubahan inkremental atau transformatif.

Terjemahan:

Membuat perubahan besar bersama-sama untuk menghentikan perubahan iklim — dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Pada tahun 2015, negara-negara di seluruh dunia sepakat untuk mencoba menjaga pemanasan planet bumi tidak melebihi dari 1,5°Celsius (2,7°F). Salah satu sumber terbesar pemanasan global adalah pembangkit listrik tenaga batu bara. Segera beralih ke penggunaan energi terbarukan, seperti angin dan tenaga surya, akan menjadi transisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa perubahan besar, perubahan iklim bisa membuat dunia tidak layak huni.

7 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

(Sustainable development)

Definisi resmi IPCC:

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan menyeimbangkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.

Terjemahan:

Hidup dengan cara yang baik bagi kita yang hidup hari ini dan untuk generasi berikut di masa depan.

Pada tahun 2015, 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi 17 ‘tujuan pembangunan berkelanjutan’ yang saling terkait. Diharapkan tercapai pada tahun 2030, tujuan-tujuan ini berupaya membantu negara-negara berkembang dengan cara yang sehat bagi manusia dan lingkungan. Memproduksi lebih banyak karbon dioksida daripada yang dapat dikelola planet ini adalah contoh pembangunan yang tidak berkelanjutan dan itulah yang menyebabkan perubahan iklim.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah seorang Profesor Kebijakan Publik, Psikologi dan Ilmu Perilaku, Sekolah Kebijakan Publik USC Sol Price, Sekolah Tinggi Sastra USC Dornsife, Seni dan Sains

Artikel ini disarikan dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia serta diterbitkan ulang dari The Conversation di bawah lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya di sini.

<https://ideas.ted.com/a-quick-guide-to-common-climate-change-jargon-terms/>





Kalianus Nusa Nipa bersama karya seni lambang Negara Burung Garuda yang terbuat dari biota laut.
Foto: Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia

Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno

Oleh **EBED DE ROSARY**

Sebuah Pohon Sukun (*Artocarpus altilis*) tumbuh subur di sisi selatan Taman Renungan Bung Karno, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di bawah rindangnya pohon ini, Soekarno pendiri negeri ini “menggali” ide hingga lahirlah Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara.

Pohon sukun bercabang lima tempat Bung Karno merenung sejatinya telah mati tahun 1970-an. “Pohon sukun bercabang lima yang ada saat ini ditanam tanggal 17 Januari 1981 oleh pemerintah disaksikan sahabat-sahabat Bung Karno dan tokoh agama,” terang Kalianus Nusa Nipa, petugas kebersihan di Taman Renungan Bung Karno.

Sebuah cabang berukuran besar sementara 4 cabang lainnya berukuran lebih kecil. Terdapat banyak anak cabang dan ranting yang rimbun serta kerap berbuah lebat.

Kalianus, lelaki kelahiran Wolowaru ini boleh dikata unik di mata kebanyakan orang. Dalam



Pohon Sukun bercabang lima yang terdapat di Taman Renungan Bung Karno di Kota Ende, Flores, NTT. Foto: **Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia**



Koleksi Museum Bahari Ende yang disimpan di kamar kos Kalianus di belakang bengkel Misi Keuskupan Agung Ende, Flores, NTT. Foto: **Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia**

keterbatasan, dirinya masih menjaga dan merawat koleksi museum bahari.

Nus sapaan karibnya mengajak Mongabay Indonesia ke lantai dua gedung perpustakaan di lokasi taman. Sebuah karya seni unik lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila berdiameter 1 meter masih dipajang.

“Sebenarnya karya seni ini mau saya berikan ke Presiden Jokowi waktu beliau kunjungi taman ini. Namun beliau tidak melihat koleksi museum bahari di lantai dua,” ucapnya.

Nus berkisah, karya seni lambang Negara Indonesia Burung Garuda terinspirasi dari puisi Garuda Sakti yang ditulisnya 1 September 2021. Ia menerjemahkan isi puisi ke dalam karya nyata.

Pekerjaan dimulai akhir Desember 2021 dari merancang hingga membuat pola berbahan parabola bekas. Waktu luang sepulang kerja sebagai petugas kebersihan di Taman Renungan Bung Karno dimanfaatkan secara maksimal.

Selama ini lambang Negara Burung Garuda dibuat dari semen, kayu, perunggu atau bahan lainnya. Nus pun membuat karya berbeda dari biota laut. Karyanya ini dibuat untuk merayakan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

“Bahan-bahannya berasal dari koleksi museum bahari. Asetnya begitu banyak, tercecer dan terbuang. Dengan tidak mengurangi koleksi utamanya, saya merangkainya menjadi lambang Negara Burung Garuda,” ungkapnya.

Penggunaan Biota Laut

Di sebelah utara bangunan, terdapat taman dan patung sang proklamator. Bung Karno

duduk di bangku dengan menyilangkan kaki sambil menatap lautan yang berada tak jauh dari taman.

Nus memaparkan alasan membuat lambang Negara Burung Garuda dari biota laut. Menurutnya, wilayah perairan laut negeri ini lebih luas dari daratan.

Kekayaan alam laut sangat potensial bagi kehidupan manusia maka sangatlah penting untuk selalu menjaga ekosistem laut dari kepunahan agar dapat dinikmati generasi nanti.

Menurutnya, laut pun menjadi pusat studi dan informasi. Pengembangan kreativitas generasi muda tentang keanekaragaman biota laut yang jumlahnya tak terbatas dan tak terukur sekaligus menjadi obyek pengembangan wisata alam dan budaya.

“Dalam rangka kampanye terhadap upaya pelestarian, penyelamatan dan perlindungan keanekaragaman biota laut, hendaknya penangkapan ikan dan pengambilan biota laut tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak merusaknya,” pesannya. Dalam keseharian Nus juga bergumul tentang Pancasila dan Bung Karno. Inspirasi ini ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul “Menyelisik Makna Pemikiran Bung Karno Melalui Simbol Alam”.

Buku setebal 60 halaman ini memuat trilogi kehidupan : Tuhan, Alam dan Manusia. Ia beralasan, ketiganya menjadi rumusan dasar Bung Karno tentang Pancasila. “Inspirasi ini lahir saat saya bekerja di Taman Renungan Bung Karno. Catatan pergumulan selama dua tahun saya susun menjadi sebuah buku,” ucapnya.

Koleksi Museum Bahari

Buku Museum Bahari Ende memuat penjelasan, ide awal pendirian museum pertama kali muncul dalam benak Almarhum Pater Gabriel Goran, SVD tahun 1990. Maret tahun 1996, Museum Bahari dibangun di lahan seluas 396 m² di Taman Renungan Bung Karno. Pemda menyiapkan lahan sementara dana pembangunan ditanggung Kongregasi SVD.

Museum Bahari pun diresmikan Bupati Ende Frans Gedowolo, 14 Agustus 1996 dan mulai dibuka untuk umum. Almarhum Pater Goran beralasan, museum ini dibangun karena Ende khususnya dan Provinsi NTT umumnya belum memiliki museum bahari untuk menyimpan aneka biota laut.

NTT sebagai provinsi kepulauan, memiliki wilayah laut dengan kekayaan biota lautnya. Untuk itu perlu dilestarikan dengan penanganan profesional guna menunjang pariwisata dan ilmu pengetahuan. Sekitar 2.500 spesies koleksi museum bahari. Ikan ± 150 spesies, *mollusca* ± 1.500 spesies serta *crustacea* seperti udang, kepiting dan lobster. Juga ada filum *Echinodermata* seperti teripang dan bulu babi, reptilia seperti kura-kura darat dan penyu.

Ada koleksi mamalia laut seperti ruas tulang lumba-lumba, paus serta seekor dugong. *Algae* seperti rumput laut dan spons laut serta beberapa jenis akar bahar, terumbu karang dan tali arus. Semua koleksi dihimpun dari masyarakat di Pulau Flores dan Lembata tanpa mengambilnya di laut.

“Dugong betina ini panjangnya sekitar 1,5 meter yang ditemukan nelayan sudah mati terdampar di Pantai Ipi Ende tahun 2000. Nelayan menyerahkannya ke museum,” terang Nus.

Pengawetan dugong awalnya menggunakan formalin. Selanjutnya menggunakan gamping dan batu kapur serta dijemur di panas mentari selama setahun. Ada juga koleksi favorit lainnya berupa naga laut. Sayangnya keberadaan museum ini hanya bertahan hingga tahun 2012. Revitalisasi taman membuat bangunan fisik museum pun dibongkar. Segala koleksinya berpindah tempat.

Kondisi Terkini

Hujan rintik menyapa saat kami menjejakan kaki di depan kamar kos di belakang Bengkel Misi Ende. Dua kamar berukuran masing-masing 3×4 m ini dipenuhi tumpukan koleksi Museum Bahari.

Sebuah kamar disekat. Satu dipakai sebagai kamar tidur. Ribuan koleksi kerang laut dan

lainnya dimasukkan ke dalam karung dan kardus lalu disusun bertumpuk di kamar satunya.

Kamar depan dipergunakan sebagai ruang kerja merangkai aneka kerajinan tangan. Itu pun masih diletakkan berbagai koleksi berukuran besar dan dalam kotak kaca.

“Tahun 2013 meskipun Pater Goran masih ada, museum dibongkar dan semua koleksi di bawa ke tempat kos saya,” ucap Nus. Pater Goran membantu biaya sekolah Nus hingga tamat SMK di Ende. Semenjak tahun 1996 dirinya mengabdikan di Museum Bahari bersama Pater Goran tanpa menuntut gaji.

Lajang kelahiran 2 Mei 1977 ini mengaku, dengan penataan sederhana saja banyak pengunjung yang tertarik menyambangi museum ini sebelum digusur. Nus bermimpi memiliki sebuah bangunan sendiri 2 lantai. Lantai 1 untuk ruang pameran koleksi museum sementara lantai 2 difungsikan sebagai galeri seni, kafe dan perpustakaan mini karena buku koleksi pribadi di Pater Goran sangat banyak.

Tidak perlu ada tiket masuk sebutnya, agar semua orang bisa menikmati museum sebagai gudang ilmu pengetahuan. “Saya akan namakan Museum Bahari Goran Shell. Shell itu sejenis kerang laut karena Pater Goran sangat terinspirasi dari kerang laut hingga mengumpulkan ribuan kerang laut,” tuturnya.

Pada 26 Desember 2019 sebelum Pater Goran wafat 28 Januari 2020, Nus dititipi pesan tetap bekerja di museum karena suatu saat museum bahari akan besar. Pater Goran telah mewasiatkan segala koleksi museum bahari kepadanya. Dia bertanggungjawab atas kelangsungan hidup museum ini meski terasa berat. Pencarian dana terus diupayakan dengan harapan ada yang terketuk hati membantu.

Biaya perawatan semua koleksi praktis mengandalkan pendapatannya dari menjual karya seni kerajinan tangan berbahan kerang yang dipungut di pinggir pantai. “Alam ini memberikan kita kehidupan sehingga menjadi kewajiban kita menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak merusak alam,” pesannya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari :

<https://www.mongabay.co.id/2022/07/10/perjuangan-kalianus-lestarikan-museum-bahari-dan-pohon-bung-karno/>



DISKUSI ONLINE LIVE

Instagram Story @infobakti

live di Story@InfoBaKTI

BERDAYA SRIKANDI

Perempuan Memberdayakan Perempuan

Bersama

Dr. Ir. Abdullah B., MM
Sekretaris Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare/
Inovator Berdaya Srikandi

Host: Sumarni Arianto

Rabu, 16 Desember 2020
Pukul 14.00 - 15.00 WITA

Berdaya Srikandi; Perempuan Memberdayakan Perempuan

Perbincangan bersama Bapak Dr. Ir. Abdullah B., MM, Inovator Berdaya Srikandi. Program yang diinisiasi Pemerintah Kota Parepare untuk memberdayakan perempuan pesisir melalui pendampingan yang berkelanjutan dan memanfaatkan potensi yang tersedia.

live di Story@InfoBaKTI

Pajak & Retribusi Online Dorong Pendapatan Daerah

Rabu, 20 Januari 2021
Pukul 14.00 - 15.00 WITA

Bersama

Abdul Asis Rahangantel, SE
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kab. Maluku Tenggara

Host: Sumarni Arianto

Pajak & Retribusi Online Dorong Pendapatan Daerah Maluku Tenggara

Kali ini menghadirkan narasumber menginspirasi dari Maluku Tenggara. Sebuah inovasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Maluku Tenggara untuk mendorong terwujudnya transparansi pengelolaan pajak daerah dan retribusi guna mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sistem pajak dan retribusi *online*.

Selengkapnya kunjungi <https://www.instagram.com/infobakti/channel>

Podcast BASUARA



Kawin Tangkap dan Tradisi Sumba

Persoalan kawin tangkap yang terjadi di tanah Sumba mendapat perhatian dari berbagai media-media nasional. Persoalan kawin tangkap merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian dari masyarakat, pemerhati budaya dan juga pemerintah daerah. Kawin tangkap sejatinya merupakan praktik yang terus berulang sehingga bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai sebuah tradisi. Itulah yang membuat praktik kawin tangkap langgeng hingga dengan saat ini. Benarkah praktik ini telah ada sejak dulu. Lalu, apakah yang salah? Mengapa praktik ini masih terus berlangsung?

Podcast BASUARA (BaKTI Pu Suara) adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Kunjungi Podcast Basuara melalui <http://bit.ly/basuara>

Artikel

UU TPKS Bisa Jadi Momentum Berantas Kekerasan Seksual Di Sekolah - Salah Satu Dosa Besar Dunia Pendidikan

Parlemen akhirnya mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) setelah diperjuangkan oleh masyarakat dan elemen sipil selama kurang lebih 10 tahun.

Namun, payung hukum yang mengatur lingkup, penanganan, dan pemidanaan kekerasan seksual ini bukan tujuan akhir. Indonesia menghadapi tugas besar untuk mengimplementasikan dan membudayakannya dalam berbagai lini dan ranah kehidupan – termasuk dunia pendidikan. Hal ini penting mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual di kalangan anak, remaja, dan pelajar dalam beberapa tahun terakhir.

- <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/uu-tpks-bisa-jadi-momentum-berantas-kekerasan-seksual-di-sekolah-%E2%80%93-salah-satu>

Referensi



Kami Jadi Target: Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online

Belum ada data yang cukup komprehensif untuk memetakan tren bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang dialami oleh perempuan pembela HAM (PPHAM), pola serangan, dan dampak yang ditimbulkan bagi PPHAM tersebut, baik secara personal maupun terkait aktivitasnya sebagai pembela HAM.

Kajian dari tim penyusun bersama SAFEnet melalui inisiatif Awes KBGO ini tidak hanya berguna untuk melihat gambaran lebih dalam situasi kekerasan berbasis gender *online* pada PPHAM, namun dapat digunakan untuk mendorong sistem dukungan yang holistik, baik dari organisasi tempatnya bekerja hingga perubahan kebijakan oleh negara. Pelindungan ini dibutuhkan karena PPHAM berada di garis depan gerakan sosial yang mengadvokasi keadilan dan kesetaraan.

- <https://www.batukarinfo.com/referensi/kami-jadi-target-pengalaman-perempuan-pembela-ham-menghadapi-kekerasan-berbasis-gender>

Berita Terbaru

Penyusunan Program INKLUSI di Tana Toraja

Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) Tana Toraja sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), memfasilitasi Penyusunan Program INKLUSI dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Tana Toraja. Penyusunan Program INKLUSI dengan DPRD Tana Toraja adalah lanjutan dari Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara YESMa dengan DPRD Tana Toraja, tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif atau Program INKLUSI di Kabupaten Tana Toraja.

- <https://www.batukarinfo.com/inklusi-bakti/penyusunan-program-inklusi-di-tana-toraja>